

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2025-2029



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat: Jalan Brigjend H. Hasan Basry Km.04 Bitahan Rantau Kode Pos 71154
Kabupaten Tapin – Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR
NOMOR : 39 Tahun 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PUPR ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan KEPALA DINAS ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 67 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 - 2029
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2025 - 2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2025 - 2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 3 Maret 2025

KEPALA DINAS PUPR ,



RIZKAN NOOR, S.T

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau.
2. Wakil KEPALA DINAS di Rantau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau
7. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; dan
8. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan KEPALA DINAS PUPR
Nomor : 39 Tahun 2025
Tanggal : 3 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025 - 2029**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Ketua Tim	Kepala Dinas PUPR
2.	Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas PUPR
3.	Kelompok Kerja	Semua Kepala Bidang Pada Dinas PUPR

DAFTAR ISI

SK TIM RENSTRA	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG..	7
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.2 Sumber Daya Manusia	20
2.1.3 Sarana dan Prasarana	21
2.1.4 Kinerja Pelayanan	23
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	33
2.1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	34
2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isi Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	37
2.2.1 Permasalahan Pelayanan	37
2.2.2 Isu-Isu Strategis.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	39
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39
3.3 Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	42
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	42
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB V PENUTUP	46
DAFTAR TABEL	
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana DPUPR Kabupaten Tapin	21
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPUPR Kabupaten Tapin	31
Tabel 3.1 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39
Tabel 3.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39
Tabel 3.3 Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran	41
Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	42
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	19
Gambar 2.2 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan...	20
Gambar 2.3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan	20
Gambar 2.4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	21
Gambar 2.5 Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	23
Gambar 2.6 Jembatan Dengan Kondisi Baik	24
Gambar 2.7 Pesentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik	25
Gambar 2.8 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten Tapin	26
Gambar 2.9 Penyelenggaraan bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten tapin, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.....	26
Gambar 2.10 Kawasan penataan bangunan dan lingkungannya di Kabupaten Tapin	27
Gambar 2.11 Pemanfaatan tata ruang berdasarkan kesesuaian dengan RTRW	27
Gambar 2.12 Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.....	28
Gambar 2.13 Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil)	29
Gambar 2.14 Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	29

Gambar 2.15 Anggaran dan Realisasi 32

Gambar 2.16 Capaian Air Minum yang terlayani di Kabupaten Tapin 33

Gambar 2.17 Capaian Air Limbah yang terlayani di Kabupaten Tapin 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis lima tahunan yang secara spesifik menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin ke dalam program dan kegiatan teknis di bidang ke-PUPR-an. Dokumen ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terukur, dan akuntabel, guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan penataan ruang dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah

Dengan Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan”. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang infrastruktur berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun

sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis tersebut disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. Rencana strategis yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan tahunan agar yang dirumuskan efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan yang memuat tujuan, sasaran, program dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis perangkat daerah setiap tahun akan dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tapin 2025-2029, sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 - 5 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 18 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);

- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11);
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Lembaran Daerah Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142 Tanggal 14 Agustus 2025 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03) Tanggal 20 Agustus 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) adalah sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program dan sasaran yang ingin dicapai dan sebagai acuan melaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tapin selama 3 tahun mendatang dalam rangka mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tapin;
2. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPUPR Kabupaten Tapin.
3. Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra DPUPR Kabupaten Tapin untuk jangka waktu lima tahun kedepan baik triwulanan, tahunan maupun akhir periode Renstra.
4. Mewujudkan kinerja dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pembangunan yang berkelanjutan sesuai visi dan Misi kepala daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 2024-2026 ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.2 Sumber Daya Manusia

2.1.3 Sarana dan Prasarana

2.1.4 Kinerja Pelayanan

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isi Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

2.2.2 Isu-Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.3 Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin adalah Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang bertugas Pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Urusan-urusan yang dilaksanakan dimaksud juga mencakup tugas-tugas Pemerintah yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin sebagai unsur urusan Wajib Pelayanan Dasar dituntut untuk mampu menyiapkan sarana dan prasarana infrastruktur yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementatif, efektif, realistis dan berorientasi pada masyarakat dan daerah, serta dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian Pelaksanaan sarana dan prasarana infrastruktur yang dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin menjadi berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapin

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin pada saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan keempat atas peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur wajib penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air minum,

- air limbah, drainase, permukiman bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
 - d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT;
 - e. Pengelolaan kesekretariatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin terdiri dari:

- 1 Kepala Dinas;
- 2 Sekretariat;
- 3 Bidang Sumber Daya Air;
- 4 Bidang Bina Marga;
- 5 Bidang Cipta Karya;
- 6 Bidang Jasa Konstruksi;
- 7 Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah (PID);
- 8 Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- 9 Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan program dan kegiatan berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. menyusun perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- b. menyusun pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- c. melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e. Pengelolaan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, konstruksi, tata ruang dan prasarana infrastruktur daerah;
- h. menetapkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana kerja Dinas tahun lalu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai pedomankerja;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina marga;
- k. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- l. mengoordinasikan, membina dan mengawas1 pelaksanaan kebijakan teknis bidang konstruksi;
- m. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata ruang dan prasarana infrastruktur daerah;
- n. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, konstruksi, tata ruang dan prasarana infrastruktur daerah;

- o. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi teknis pekerjaan umum dan penataan ruang;
- p. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT;
- q. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, penggandaan, protokoler, organisasi, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas
- c. penyusunan program, koordinasi, pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
- d. penyusunan . program, koordinasi, pengendalian pengelolaan asset Dinas
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian
- g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi tatalaksana dan hubungan masyarakat
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan

- mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - j. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - k. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - l. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
 - m. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - n. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas
 - p. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Dinas; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
 - r. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub bagian Keuangan
 - s. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengenda1ikan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan dan operasi serta pemeliharaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan sumber daya air
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan
- d. pemantauan dan evaluasi dibidang sumber daya air.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis dibidang sumber daya air
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan sumber daya air
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan operasi dan pemeliharaan
- e. memantau, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bidang Bina Marga mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan, dan preservasi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis di bidang bina marga;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

- mengendalikan perencanaan evaluasi;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan preservasi jalan dan jembatan
 - e. menyusun dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menetapkan laik fungsi jalan dan jembatan
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja bidang bina marga
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas mengoordinasi, mengatur, membina dan mengendalikan perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, dan pelaksanaan penataan bangunan dan bangunan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengaturan perencanaan dan pengendalian;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penataan bangunan dan bangunan permukiman; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cipta karya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang

- cipta karya
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengendalian
 - c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan
 - d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan preservasi jalan dan jembatan
 - e. Menyusun dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan
 - f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menetapkan laik fungsi jalan dan jembatan
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja bidang bina marga
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan pengaturan dan pembinaan jasa konstruksi, pemberdayaan dan peralatan, dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengaturan dan pembinaan jasa konstruksi;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan dan peralatan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan jasa konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
- f. bidang jasa konstruksi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan jasa konstruksi, pemberdayaan dan peralatan, dan pengawasan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengaturan dan pembinaan jasa konstruksi;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
- d. dan mengendalikan pemberdayaan dan peralatan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan, menyebarluaskan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di daerah
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di daerah
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di daerah
- k. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di daerah
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di daerah

- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di daerah
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan merumuskan rekomendasi/keputusan yang berkenaan dengan pemberian izin usaha jasa konstruksi, bimbingan teknis dan uji mutu konstruksi serta pelaksanaan perencanaan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan logistik dan peralatan sesuai perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang jasa konstruksi
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Bidang Tata Ruang Dan Prasarana Infrastruktur Daerah

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan pengaturan dan pembinaan, pelaksanaan penataan ruang dan prasarana infrastruktur daerah, pengawasan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengaturan dan pembinaan
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penataan ruang dan prasarana infrastruktur daerah
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan dan pengendalian; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan, pelaksanaan penataan ruang dan prasarana infrastruktur daerah dan pengawasan dan pengendalian
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengaturan dan pembinaan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penataan ruang dan prasarana infrastruktur daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan dan pengendalian;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan penataan, pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis daerah;
- f. mengadakan kerjasama dengan unit kerja dan satuan kerja terkait yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada Kecamatan dan masyarakat
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerjasama penataan ruang antar Kecamatan dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar Kecamatan
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten tetangga dan Pemerintah Provinsi sesuai prosedur untuk

penataan ruang antar daerah

- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendaJikan dan menyusun standar pelayanan minimal penataan ruang sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja bidang tata ruang dan prasarana infrastruktur
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

8. Unit Pelaksanaan Teknis

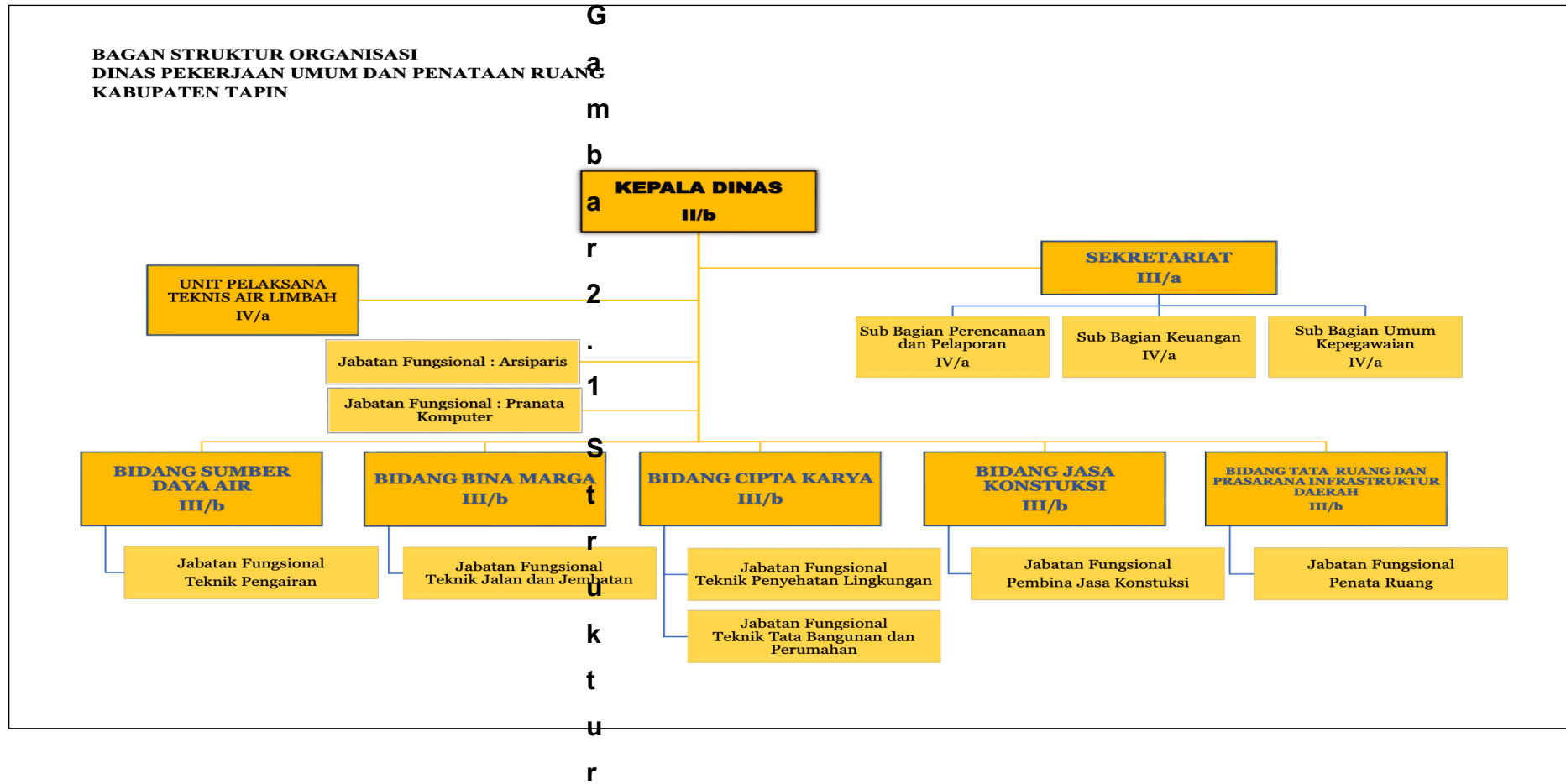
Ketentuan tentang Pembentukan UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan antara lain;

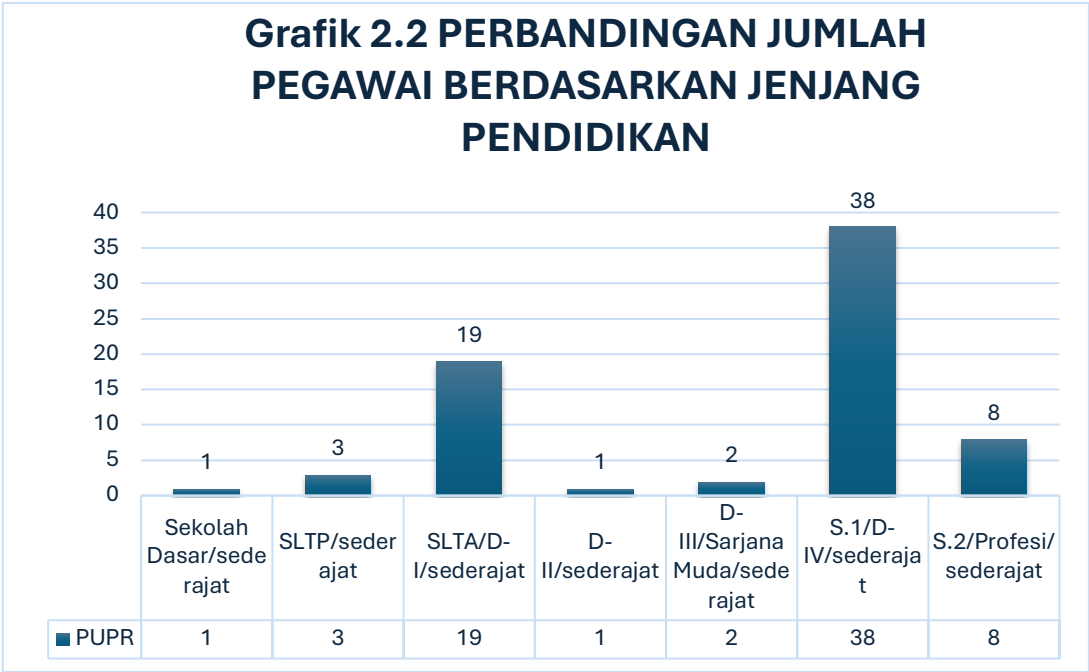
1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

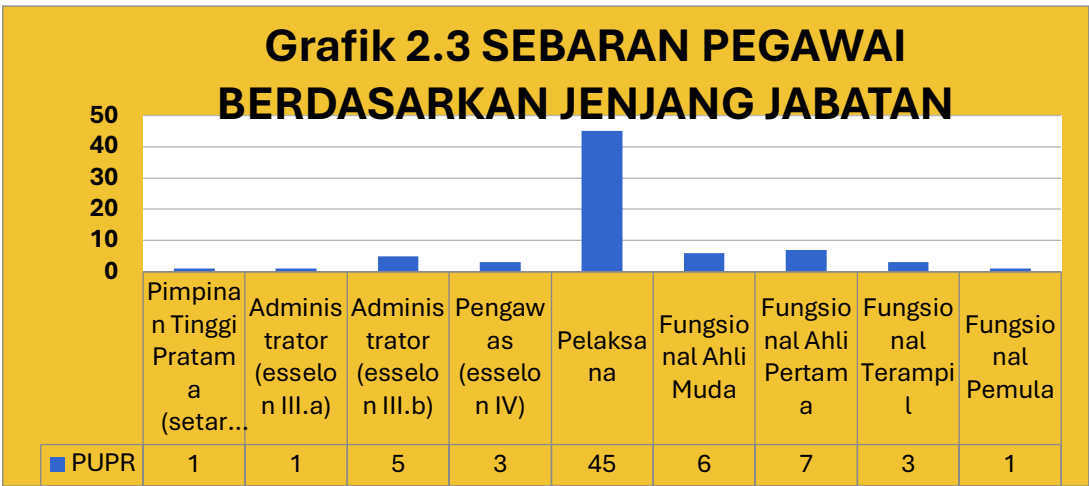


2.1.2 Sumber Daya Manusia

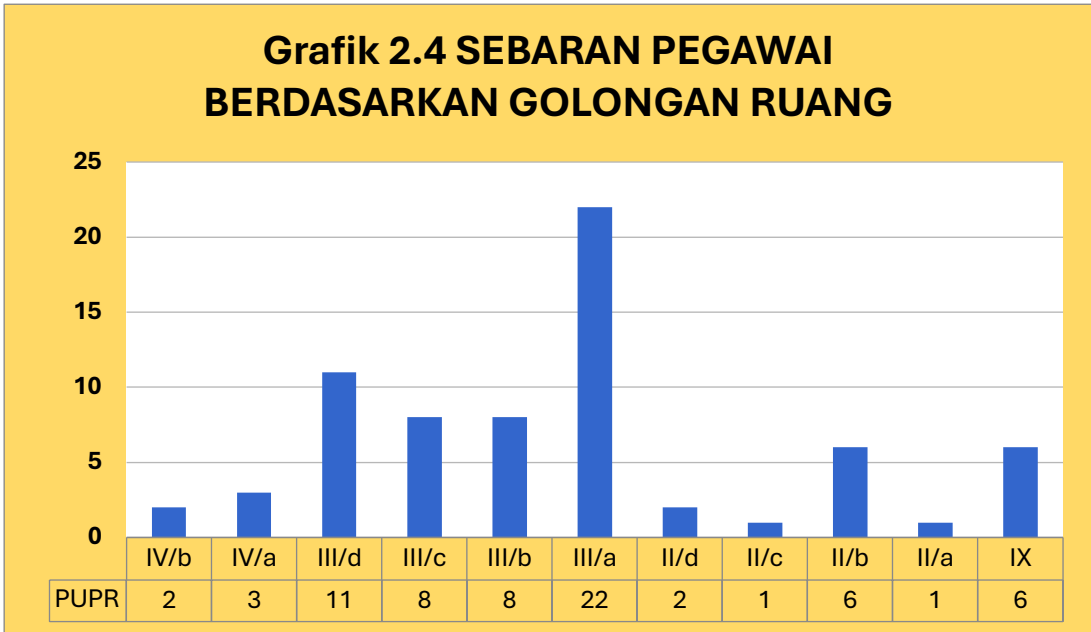
Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 72 (Tujuh puluh dua) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki berbagai latar belakang dari berbagai jenjang pendidikan, jenjang jabatan dan golongan ruang sebagaimana pada tabel dibawah ini.



Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin di dominasi oleh latar belakang pendidikan Sarjana (S.1/D-IV/ sederajat), yang menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin memiliki komposisi ASN yang sangat terdidik



Tabel ini menggambarkan struktur organisasi yang ramping di tingkat manajemen puncak dan administrator, dengan fokus utama pada posisi pelaksana dan jabatan fungsional yang jumlahnya jauh lebih besar. Ini adalah struktur yang mengutamakan efisiensi operasional di tingkat dasar.



Pada tabel mayoritas pegawai berada di golongan III/a, ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yang dimiliki adalah mereka yang berada pada level awal karir profesional atau setara dengan tingkat Sarjana. Proporsi yang lebih sedikit di golongan IV juga mengindikasikan bahwa jumlah pegawai di level manajerial atau yang memiliki masa kerja dan pengalaman lebih panjang relatif terbatas.

2.1.3 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, DPUPR Kabupaten Tapin memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini DPUPR memiliki gedung kantor sendiri, Jalan Raya Brigjend H. Hasan Basri KM, 4 Bitahan Rantau Lokpaikat Kabupaten Tapin.

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana DPUPR Kabupaten Tapin Tahun 2025

Penggolongan dan Kodefikasi Barang									Jumlah
Kode Barang								Nama Barang	
1								2	3
1	3	2						PERALATAN DAN MESIN	1338
1	3	2	01					ALAT BESAR	30

1	3	2	01	01			ALAT BESAR DARAT	18
1	3	2	01	01	02		GRADER	3
1	3	2	01	01	03		EXCAVATOR	1
1	3	2	01	01	05		HAULER	2
1	3	2	01	01	06		ASPHALT EQUIPMENT	1
1	3	2	01	01	07		COMPACTING EQUIPMENT	7
1	3	2	01	01	08		AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	1
1	3	2	01	01	09		LOADER	1
1	3	2	01	01	10		ALAT PENGANGKAT	1
1	3	2	01	01	11		MESIN PROSES	1
1	3	2	01	03	04		ELECTRIC GENERATING SET	7
1	3	2	01	03	05		POMPA	3
1	3	2	01	03	06		MESIN BOR	2
1	3	2	02	01	02		KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	1
1	3	2	02	01	03		KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7
1	3	2	02	01	04		KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	45
1	3	2	02	01	06		KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	1
1	3	2	02	01	09		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	1
1	3	2	03	01	01		PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	8
1	3	2	03	01	02		PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	3
1	3	2	03	01	03		PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	1
1	3	2	03	01	06		PERKAKAS BENGKEL KAYU	2
1	3	2	03	01	08		PERALATAN LAS	1
1	3	2	03	02	03		PERKAKAS BENGKEL SERVICE	4
1	3	2	03	02	05		PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	7
1	3	2	03	02	07		PERKAKAS BENGKEL KERJA	1
1	3	2	03	02	11		PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	4
1	3	2	03	03	01		ALAT UKUR UNIVERSAL	32
1	3	2	03	03	09		ALAT UKUR LAIN-LAIN	7
1	3	2	04	01	02		ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	3
1	3	2	05	01	01		MESIN KETIK	1
1	3	2	05	01	03		ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	1
1	3	2	05	01	04		ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	102
1	3	2	05	01	05		ALAT KANTOR LAINNYA	10
1	3	2	05	02	01		MEUBELAIR	357
1	3	2	05	02	03		ALAT PEMBERSIH	10
1	3	2	05	02	04		ALAT PENDINGIN	65
1	3	2	05	02	06		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	77
1	3	2	05	03	01		MEJA KERJA PEJABAT	54
1	3	2	05	03	02		MEJA RAPAT PEJABAT	1
1	3	2	05	03	03		KURSI KERJA PEJABAT	85
1	3	2	05	03	05		KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	2
1	3	2	05	03	06		KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	1
1	3	2	06	01	01		PERALATAN STUDIO AUDIO	16
1	3	2	06	01	02		PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	28
1	3	2	06	01	05		PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	7
1	3	2	06	01	06		ALAT STUDIO LAINNYA	3
1	3	2	06	02	01		ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	8
1	3	2	08	01	06		ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	12

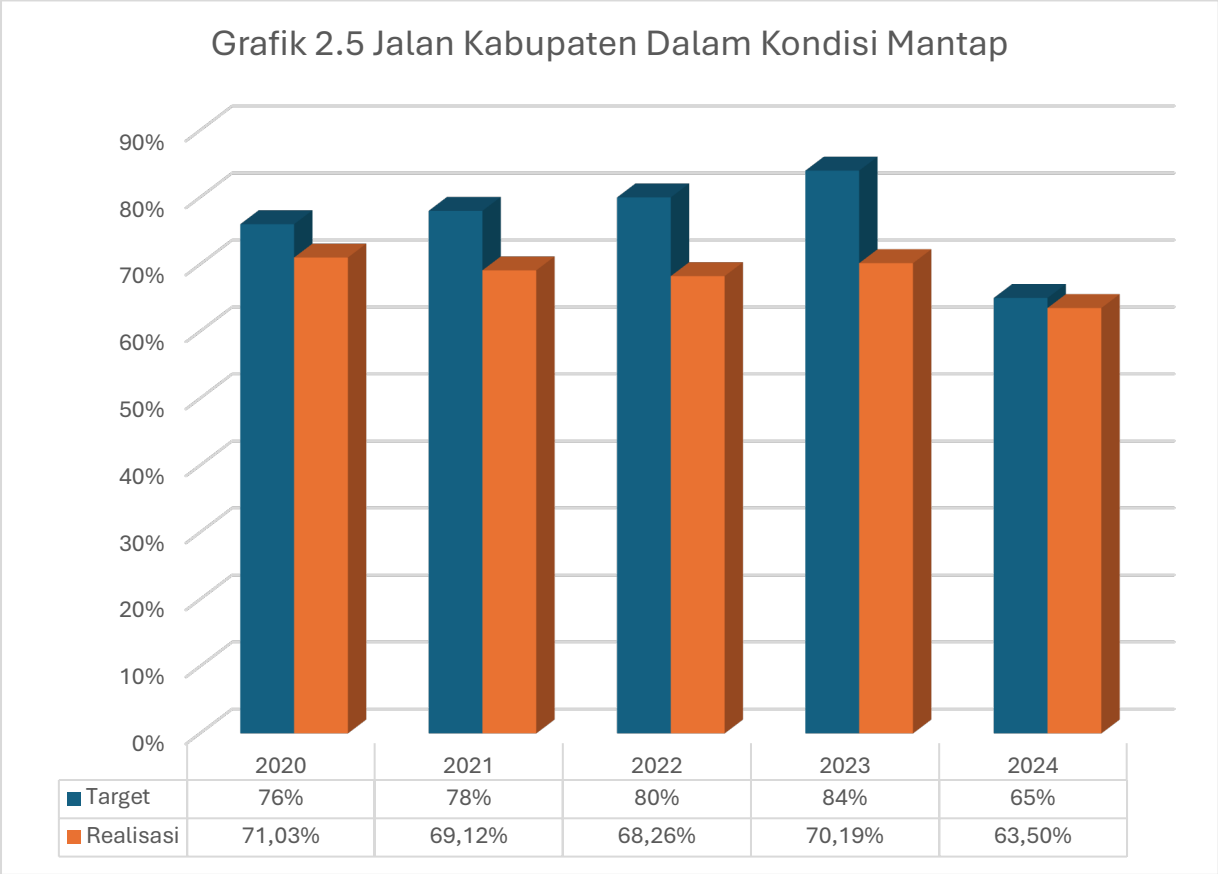
1	3	2	08	01	12		ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	3
1	3	2	08	01	41		ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	3
1	3	2	08	01	56		ALAT LABORATORIUM LAIN	6
1	3	2	08	05	02		ALAT KESEHATAN KERJA	16
1	3	2	10	01	02		PERSONAL KOMPUTER	211
1	3	2	10	02	01		PERALATAN MAINFRAME	3
1	3	2	10	02	02		PERALATAN MINI KOMPUTER	4
1	3	2	10	02	03		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	92
1	3	2	10	02	04		PERALATAN JARINGAN	2
							Total	1338

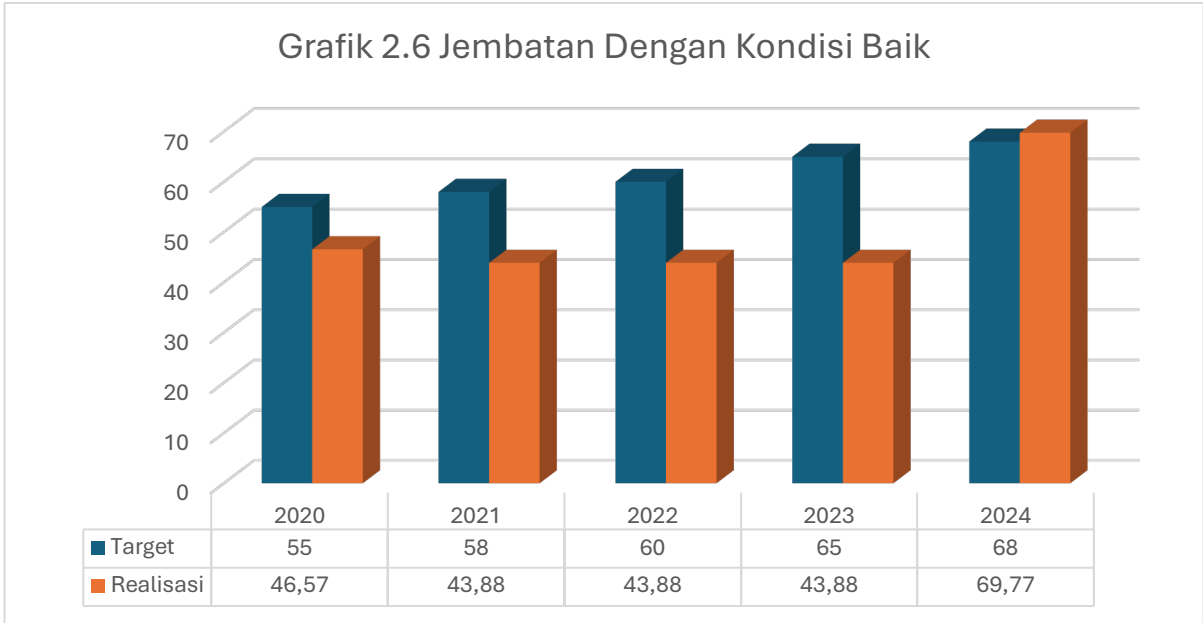
Sumber: Dinas PUPR Kab. Tapin

2.1.4 Kinerja Pelayanan

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja DPUPR, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Kinerja Pelayanan yang memnjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan jalan dan Jembatan kabupaten/kota





Konektivitas jalan di Kabupaten Tapin telah menjangkau seluruh Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan seiring dengan kebijakan penataan ruang kabupaten berupa peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah secara merata dan berhierarki, dengan kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi mantap masih rendah. Pada tahun 2020 mencapai 71,03% kemudian mengalami penurunan kondisi di tiap tahunnya pada kondisi Mantap Jalan Kabupaten tahun 2024 sebesar 63,50%. Adapun penyebab masih rendahnya persentasi jalan kabupaten yang dalam kondisi Mantap adalah karena :

- (1) Besarnya panjang jalan yang harus dipelihara;
- (2) Pengawasan yang kurang;
- (3) Kualitas pembangunan jalan yang buruk;
- (4) Kondisi fisik/tanah yang labil;
- (5) Terbatasnya biaya pemeliharaan jalan; dan
- (6) Seringnya terjadi genangan air di jalan akibat hujan yang dapat merusak jalan.

Hal yang mempengaruhi Tingkat kemantapan penyelenggaraan Jalan kewenangan Kabupaten ialah Perubahan status ruas jalan kabupaten seiring dengan perkembangan kawasan strategis cepat tumbuh suatu wilayah serta perlunya penyesuaian status ruas kabupaten secara berkala terakhir SK Kepala Daerah Ruas Jalan Kabupaten Tapin Tahun 2016 (159 Ruas Jalan dengan Total Panjang 617,15 Km) diterbitkan lah Keputusan Bupati Tapin Nomor 100.3.3.2/093/KUM/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten dengan 169 Ruas Jalan Kabupaten total Panjang 591,111 Km.

Sesuai Rekapitulasi Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten untuk LPPD 2024 Kabupaten Tapin, Panjang Kondisi Jalan dengan Kondisi Baik 107,03 Km

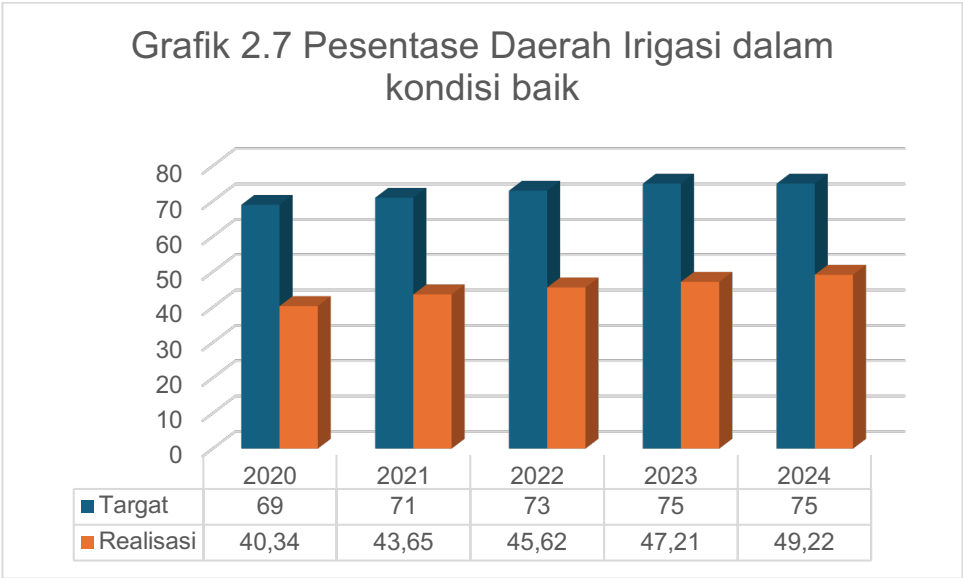
sebesar 18,11%; Kondisi Sedang 230,20 Km sebesar 38,94%; Kondisi Rusak Ringan 82,44 Km sebesar 13,95% dan Kondisi Rusak Berat 171,44 Km sebesar 29,00%.

Strategi Penataan Ruang yang termaktub didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2024-2043 untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah berupa peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dengan melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten untuk memperlancar pergerakan penumpang dan barang intra dan antar Wilayah, antar moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis.

Sistem Jaringan Jalan di Kabupaten Tapin terdiri dari Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, Jalan Lokal Primer yang melintas di seluruh kecamatan dan Jalan Lingkungan Primer berupa jalan lingkungan antar desa/kelurahan disetiap kecamatan.

Sesuai data Lokasi jembatan eksisting ruas Jalan kewenangan Kabupaten pada Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi RTRW Kabupaten Tapin 2024-2043 sebanyak 236 titik Lokasi jembatan, dengan konsentrasi terbanyak berada di Kecamatan Candi Laras Utara dan Kecamatan Candi Laras Selatan.

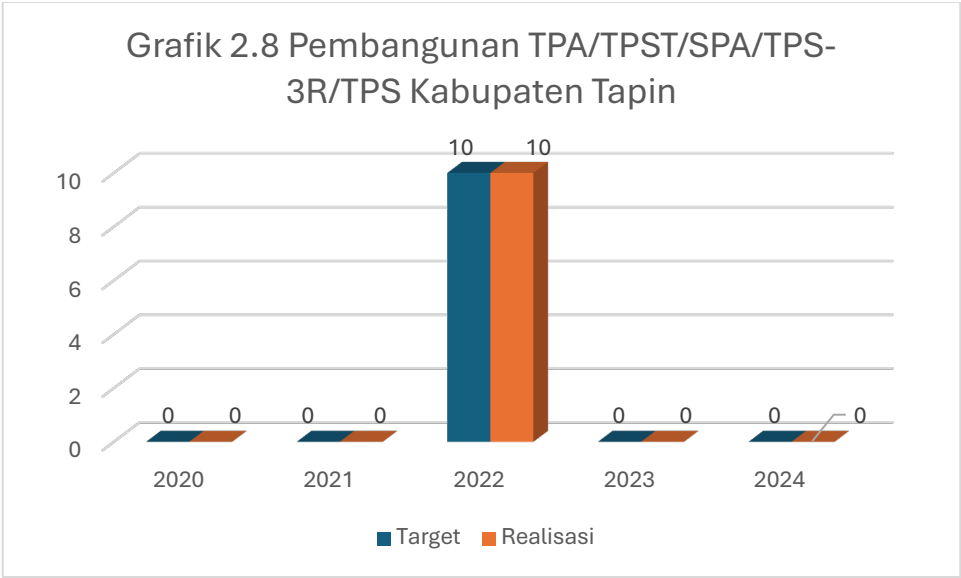
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Sumber Daya Air



Pada gambar grafik ditampilkan bahwa pencapaian presentas daerah irigasi dalam kondisi baik pada setiap tahunnya belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan masih tergantung pada dana dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya. Apalagi sejak tahun 2023 DAK Bidang Sumber Daya Air sudah tidak mendapat

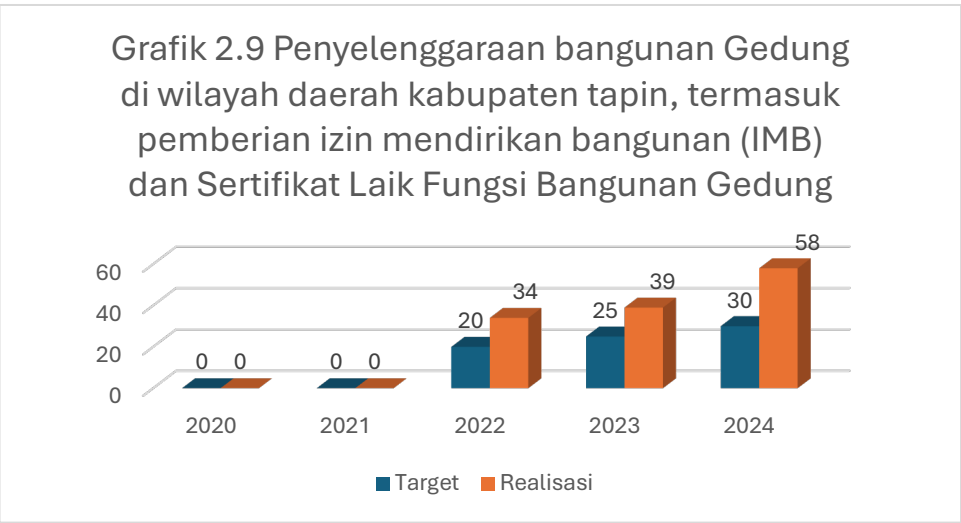
anggaran dari pemerintah pusat sehingga dengan hal tersebut capaian tidak dapat meningkat secara signifikan yang berdampak tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dana APBD yang dianggarkan lebih banyak dilakukan untuk melakukan normalisasi sungai dan pembuatan pengaman tebing sehingga tidak terlalu berdampak terhadap target yang telah kinerja yang telah ditetapkan.

3. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kabupaten Tapin



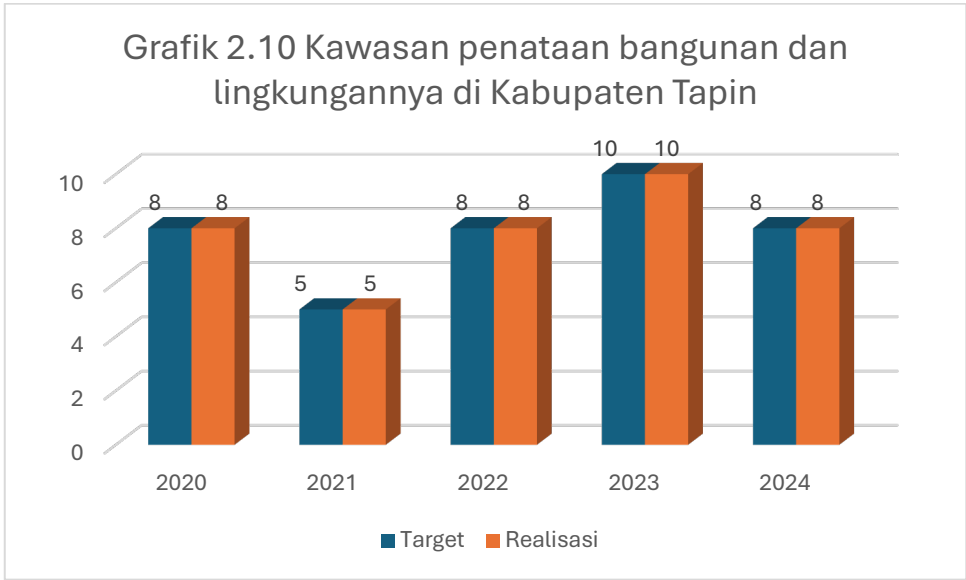
Berdasarkan Grafik 2.7 pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS) hanya terj adi pada tahun 2022, dengan jumlah sebanyak 10 unit. Tidak terdapat pembangunan fasilitas serupa pada tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024. Hal ini menunjukkan adanya intervensi besar pada tahun 2022, yang diharapkan memberikan dampak jangka panjang dalam pengelolaan sampah domestik di Kabupaten Tapin.

4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung



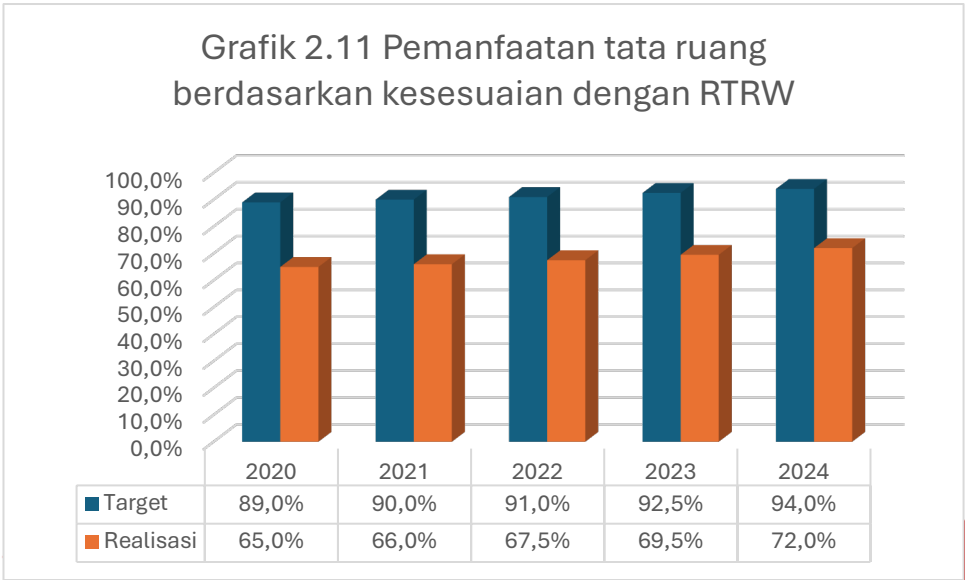
Pada Grafik 2.8 menunjukkan bahwa Capaian penyelenggaraan bangunan gedung, yang meliputi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi, dimulai sejak tahun 2022. Pada tahun tersebut, terdapat 34 rekomendasi PBG/SLF yang dikeluarkan oleh DPUPR, kemudian meningkat menjadi 39 rekomendasi PBG/SLF pada tahun 2023, dan mencapai 58 rekomendasi PBG/SLF pada tahun 2024.

5. Penataan Kawasan Bangunan dan Lingkungannya



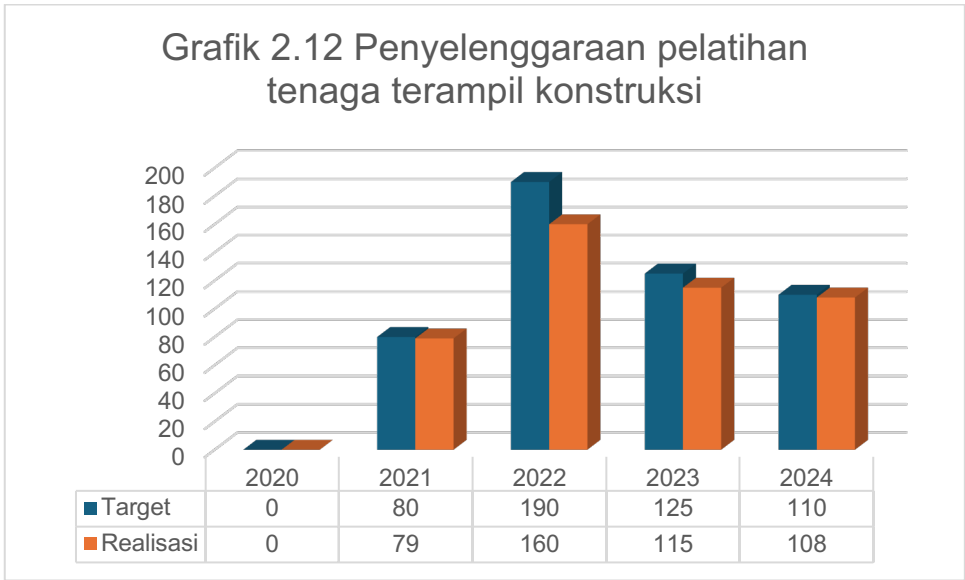
Pada Grafik 2.9 menunjukkan bahwa Capaian kawasan yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya relatif stabil. Pada tahun 2020 dan 2022, jumlah kawasan yang ditata adalah 8 kawasan, menurun menjadi 5 kawasan penataan pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 10 kawasan pada tahun 2023. Tahun 2024 menunjukkan kembali ke 8 kawasan penataan.

6. Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota



Pada Grafik 2.10 Penyelenggaraan pemanfaatan tata ruang berdasarkan kesesuaian dengan RTRW menunjukkan adanya kesenjangan antara target perencanaan dan realisasi. Rencana selalu berada di atas 80%, sedangkan realisasi masih di kisaran 60–72%, namun menunjukkan tren meningkat tiap tahun. Secara keseluruhan, meskipun terdapat gap signifikan antara rencana dan realisasi, namun tren pertumbuhan realisasi menunjukkan bahwa arah kebijakan berjalan ke jalur yang benar. Upaya yang perlu diperkuat adalah pengendalian pemanfaatan ruang, penegakan aturan, serta memperluas peran masyarakat dan swasta dalam menjaga kesesuaian ruang dengan RTRW.

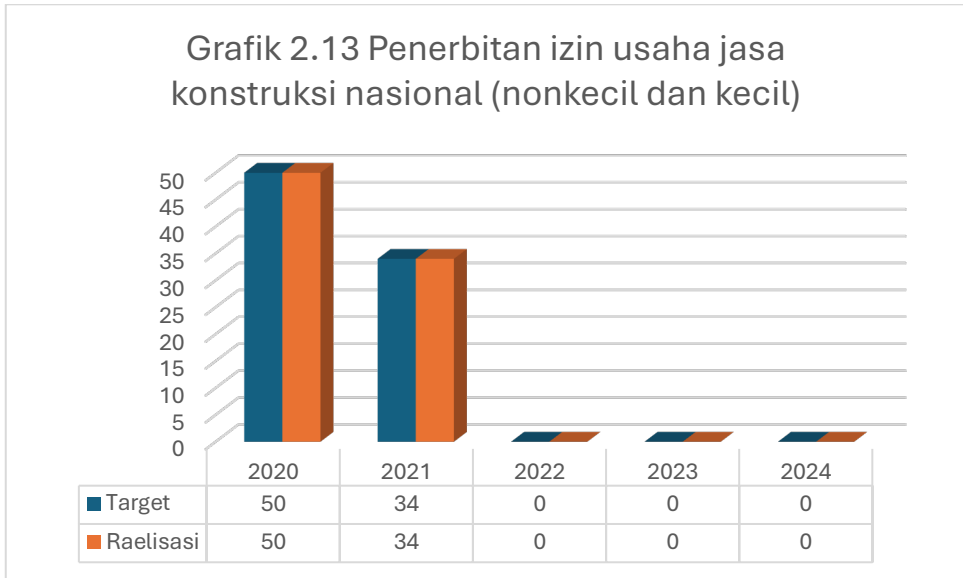
7. Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi



Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa program pelatihan tenaga terampil konstruksi memiliki tingkat efektivitas dan konsistensi yang tinggi dalam mencapai target yang ditetapkan. Meskipun terjadi fluktuasi pada jumlah target tahunan, terutama setelah lonjakan pada tahun 2022, persentase realisasi terhadap target selalu berada pada level yang sangat baik, melebihi 80% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen kuat dan efisiensi dalam pelaksanaan program, yang berhasil mengimplementasikan hampir seluruh rencana pelatihan yang telah ditetapkan.

Data ini menggarisbawahi satu hal penting: meskipun skala program berfluktuasi, komitmen untuk mencapai target tetap sangat tinggi. Setiap tahunnya, program ini secara konsisten berhasil merealisasikan hampir seluruh target yang ditetapkan, membuktikan efektivitasnya dalam mencetak tenaga kerja terampil di sektor konstruksi.

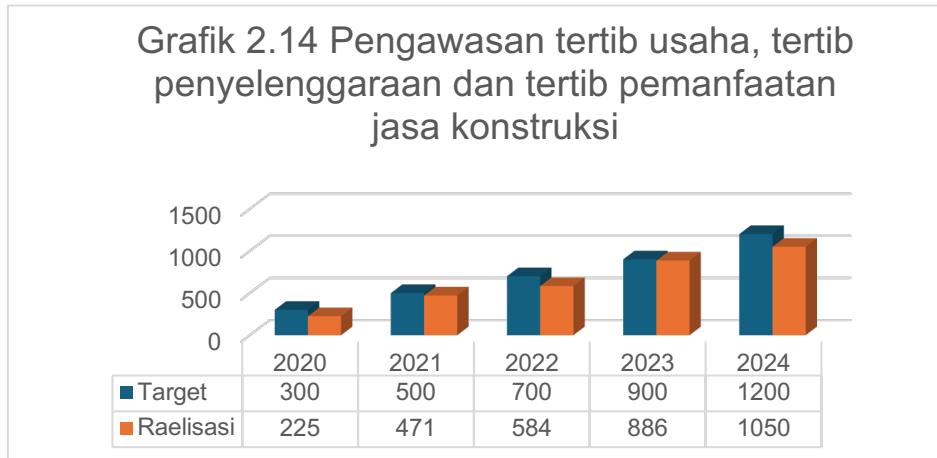
8. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil)



Grafik ini menyajikan data kinerja penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional untuk kategori nonkecil dan kecil dari tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan dua fase kinerja yang sangat kontras. Fase pertama, dari tahun 2020 hingga 2021, menunjukkan efektivitas program yang sangat tinggi dan konsisten. Pada tahun 2020, target yang ditetapkan sebanyak 50 izin berhasil terealisasi seluruhnya. Efektivitas ini berlanjut di tahun 2021, di mana dari target 34 izin, realisasi juga mencapai angka yang sama. Kinerja yang sempurna ini mengindikasikan bahwa sistem dan proses perizinan berjalan dengan sangat optimal pada periode tersebut.

Kemudian mengalami perubahan drastis pada fase kedua, yang dimulai dari tahun 2022. Sejak tahun tersebut hingga 2024, aktivitas penerbitan izin sepenuhnya terhenti. Tabel data menunjukkan bahwa baik target maupun realisasi tercatat nol selama tiga tahun berturut-turut. Kondisi ini disebabkan oleh regulasi yang mengamankan bahwa penerbitan izin usaha konstruksi bukan lagi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

9. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

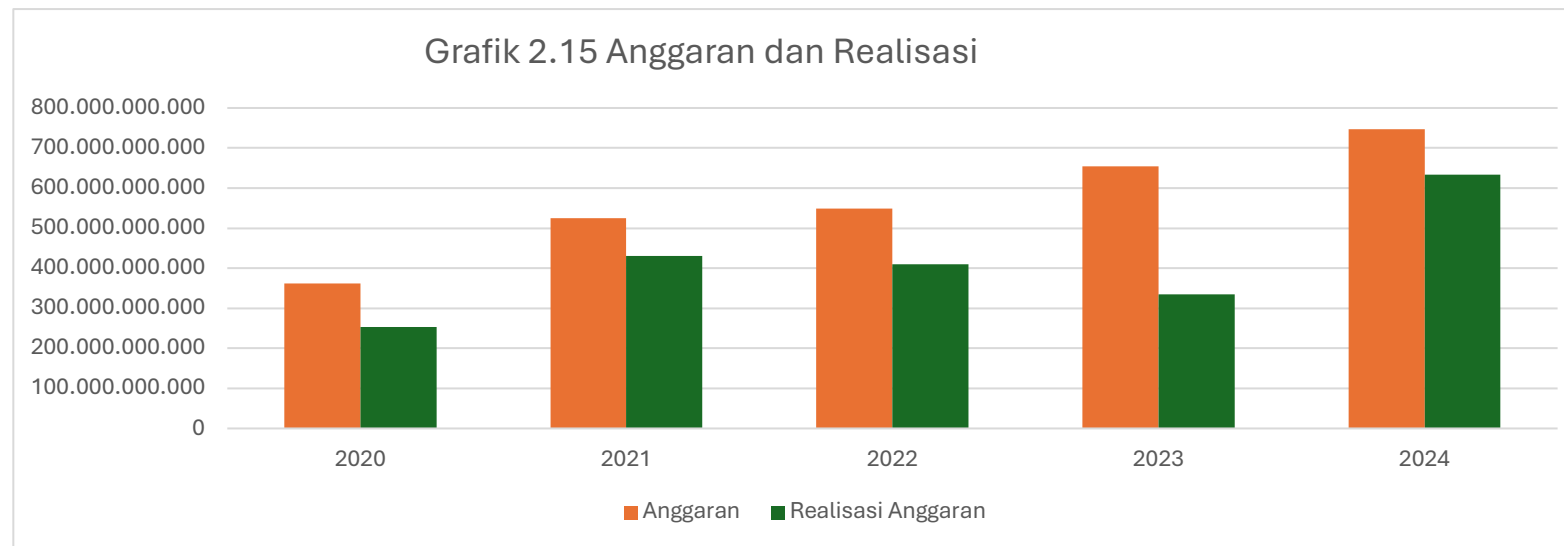


Grafik ini menyajikan data kinerja pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dari tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten baik pada target maupun realisasi. Peningkatan ini menggambarkan intensifikasi upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bidang terkait pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Target pengawasan meningkat secara progresif dari 300 di tahun 2020 menjadi 1.200 di tahun 2024, sementara realisasinya juga tumbuh dari 225 menjadi 1.050 dalam periode yang sama, mengindikasikan ekspansi kapasitas dan ruang lingkup program.

Data ini menunjukkan bahwa program pengawasan jasa konstruksi memiliki kapasitas yang terbukti untuk terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Meskipun target tidak pernah tercapai secara sempurna, selisih antara target dan realisasi selalu dalam batas yang dapat diterima, menandakan efisiensi operasional yang solid. Konsistensi dalam menghadapi target yang semakin menantang menjadikan program ini sebagai indikator kinerja utama yang dapat diandalkan. Kinerja yang positif ini merupakan landasan yang kuat untuk perumusan kebijakan dan perencanaan strategis di masa depan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan sektor konstruksi secara berkelanjutan.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPUPR Kabupaten Tapin
2020-2024

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Capaian Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
I	Belanja Operasi	62.958.800.077	113.165.477.994	112.299.561.582	248.631.496.703	299.496.607.121	56.534.904.027	106.556.975.033	92.282.990.864	132.043.274.276	177.034.694.396	89,80	94,16	82,18	53,11	59,11
1	Belanja Pegawai	10.378.538.399	11.250.150.797	13.844.262.533	12.653.473.259	13.788.474.542	9.162.324.686	10.927.627.817	11.147.777.637	11.136.465.374	12.040.040.160	88,28	97,13	80,52	88,01	87,32
2	Belanja Barang	46.686.261.678	78.458.228.875	95.560.299.049	235.978.023.444	285.708.132.579	41.478.579.341	73.611.570.156	78.698.165.127	120.906.808.902	164.994.654.236	88,85	93,82	82,35	51,24	57,75
3	Belanja Hibah	5.894.000.000	23.457.098.322	-	-	-	5.894.000.000	22.017.777.060	-	-	-	100,00	93,86	-	-	-
II	Belanja Modal	299.495.249.000	410.945.739.381	436.500.357.773	406.375.828.553	446.865.403.099	196.104.551.309	324.157.588.322	318.286.475.249	202.625.293.570	456.135.861.200	65,48	78,88	72,92	49,86	102,07
1	Belanja Tanah	65.177.040.000	28.411.682.358	19.660.000.000	11.450.000.000	-	28.550.657.380	-	-	-	-	43,80	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	745.625.000	1.940.996.050	902.572.900	2.301.257.830	1.426.842.765	339.970.000	1.450.823.700	477.305.000	1.890.505.000	1.036.713.250	45,60	74,75	52,88	82,15	72,66
3	Belanja Bangunan dan Gedung	120.819.032.500	228.676.971.000	138.491.471.709	74.608.454.238	39.232.473.430	59.185.013.839	184.757.519.361	111.189.162.401	55.627.452.759	31.107.355.607	48,99	80,79	80,29	74,56	79,29
4	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	102.183.981.500	151.916.089.973	277.446.313.164	317.991.366.485	406.206.086.904	98.704.979.039	137.949.245.261	206.620.007.848	145.106.315.811	247.297.997.947	96,60	90,81	74,47	45,63	60,88
5	Belanja Aset Lainnya	10.569.570.000	-	-	24.750.000	-	9.323.931.050	-	-	1.020.000	-	88,21	-	-	4,12	-
Jumlah		362.454.049.077	524.111.217.375	548.799.919.355	655.007.325.256	746.362.010.220	252.639.455.335	430.714.563.355	410.569.466.113	334.668.567.846	633.170.555.596	69,70	82,18	74,81	51,09	84,83



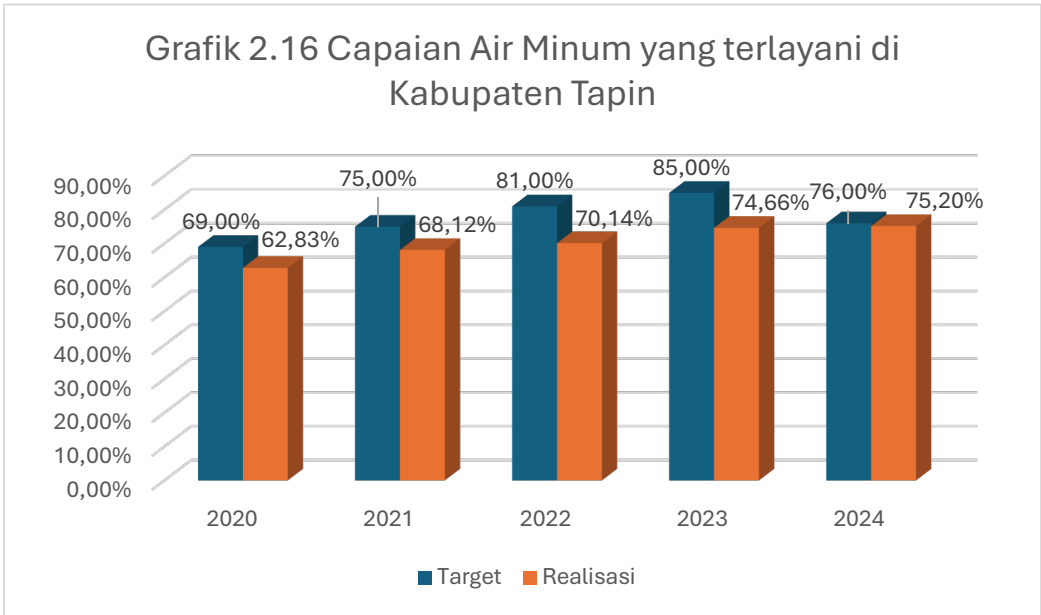
Grafik ini menyajikan data historis mengenai alokasi anggaran dan realisasinya dari tahun 2020 hingga 2024. tingkat penyerapan anggaran menunjukkan dinamika yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, realisasi anggaran mencapai sekitar 71,4% dari total anggaran yang dialokasikan. Persentase ini meningkat menjadi sekitar 80,8% di tahun 2021 dan sedikit menurun menjadi 74,1% di tahun 2022. Namun, titik krusial dalam narasi ini terjadi di tahun 2023, di mana realisasi anggaran mengalami penurunan drastis hingga di bawah 50% dari anggaran yang sangat besar. Penurunan tajam ini menandakan adanya kendala operasional, hambatan implementasi, atau perubahan kebijakan yang signifikan dan membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Kinerja keuangan kemudian menunjukkan pemulihan yang kuat di tahun 2024, dengan realisasi mencapai sekitar 83,8% dari anggaran yang dialokasikan, menunjukkan bahwa program berhasil mengatasi tantangan yang terjadi di tahun sebelumnya.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standart Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum adalah :

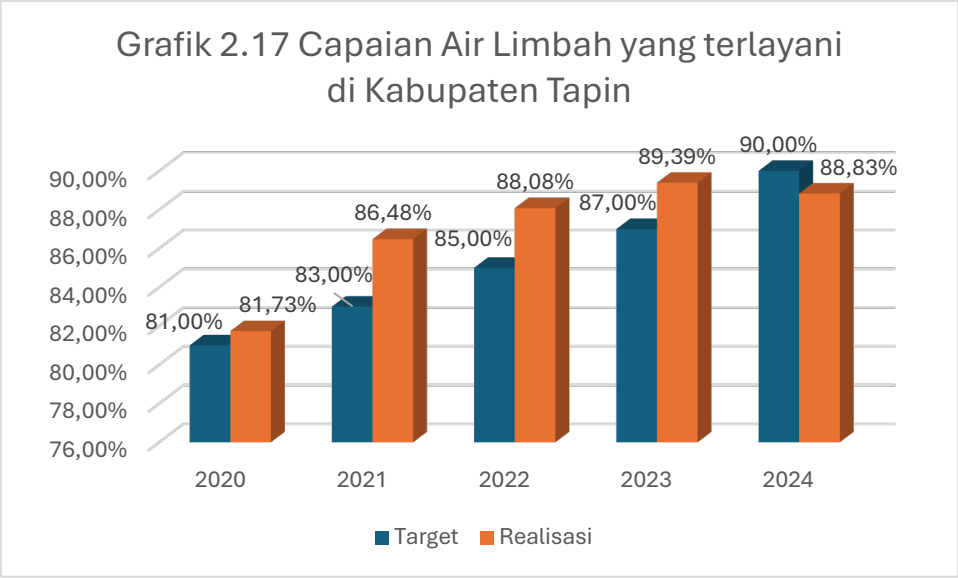
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari



Grafik 2.5 menunjukkan perkembangan jumlah KK yang terlayani air minum di Kabupaten Tapin selama periode 2020 hingga 2024 yang tersebar di 12 Kecamatan, baik air minum dari jaringan perpipaan maupun bukan perpipaan. Terdapat peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang terlayani air minum tercatat sebanyak 35.237 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 38.204 jiwa pada tahun 2021, dan terus naik menjadi 39.339 jiwa pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana capaian layanan air minum melonjak menjadi 47.703 jiwa. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan capaian 52.228 jiwa.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik



Grafik 2.6 menunjukkan jumlah penduduk yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Tapin selama periode 2020–2024 yang tersebar di 12 Kecamatan. Pada tahun 2020, terdapat 45.842 jiwa yang terlayani. Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 41.993 jiwa, namun kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 49.403 jiwa. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 60.799 jiwa, dan terus naik menjadi 61.697 jiwa pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan peningkatan akses layanan sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat.

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tingkat kerusakan kondisi jalan disebabkan rendahnya disiplin pengguna jalan seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diijinkan, kejadian bencana alam yang menyebabkan kerusakan jalan serta masih perlu ditingkatkannya kompetensi pelaksana proyek. Sampai dengan tahun 2016 dihadapi tantangan menurunnya kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan dan dimensi berlebih yang antara lain ditangani meskipun belum menyeluruh melalui pembangunan dan peningkatan jalan baik pada jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan poros desa. Sedangkan kondisi sumber daya air di Kabupaten Kuningan belum optimalnya lahan sawah beririgasi, sungai-sungai mengalami pendangkalan dan sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan rawan gerakan tanah. Sehingga diperlukan upaya penanganan secara komprehensif dalam pengelolaan sumber daya air.

Tantangan yang dihadapi DPUPR Kabupaten Tapin 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Meningkatnya muatan dan dimensi berlebih dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan jalan dan jembatan..
2. Masih adanya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya akses dari pusat produksi ke pemasaran, termasuk masih adanya daerah yang terisolasi bahkan biaya produksi lebih tinggi dari pendapatan masyarakat..
3. Banyaknya kerusakan prasarana jalan dan jembatan akibat bencana alam, menyebabkan alokasi yang semula untuk pemeliharaan jalan, berubah untuk penanganan tanggap darurat.
4. Mewujudkan keseimbangan dan keterkaitan pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai penataan ruang.
5. Semakin terbatasnya kemampuan Pemerintah dalam membiayai pembangunan prasarana jalan dan jembatan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan yang ada, sehingga diperlukan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang ada, dan mencari terobosan sumber-sumber pendanaan dari masyarakat atau swasta.
6. Sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah.
7. Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
8. Terjadinya bencana alam yang dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, DPUPR juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh DPUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa peraturan turunannya memberi peluang bagi DPUPR untuk menjalankan peran penting dalam proses pembangunan daerah.
2. Telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memberikan arah bagi DPUPR dalam merespon pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
3. Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Tapin yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah.
4. Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD Kabupaten (APBD Propinsi dan APBN) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan.
5. Adanya "**musrenbang**" dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun.

2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isi Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan infrastruktur dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Belum optimalnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah
3. Belum optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang
4. Belum optimalnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap
5. Belum optimalnya kinerja pelayanan Jaringan irigasi
6. Belum optimalnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat
7. Belum optimalnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik

2.2.2 Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan DPUPR Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

- a. Isu Strategis Bidang Bina Marga
 1. Belum optimalnya layanan insfratraktur penyelenggaraan jalan, jembatan dan drainase sesuai kewenangan kabupaten
 2. Belum maksimalnya jaringan jalan sesuai standar yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Tapin
 3. Kurangnya jaringan jalan untuk konektivitas antar wilayah
- b. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air
 1. Belum optimalnya layanan insfratraktur irigasi kewenangan kabupaten
 2. Masih terdapat daerah yang berpotensi banjir di Kabupaten Tapin
 3. Masih banyaknya potensi terjadinya longsor tebing sungai yang diakibatkan oleh

- peningkatan debit air sungai yang mengancam konektivitas dan infrastruktur
4. Kurang optimalnya koordinasi terkait pengelolaan SDA antara kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat
 5. Kondisi jaringan irigasi dalam kondisi sedang dan rusak berat masih banyak.
- c. Isu Strategis Bidang Tata Ruang
1. Belum Tertibnya Penyelenggaraan Tata Ruang
 2. Belum terselesaikannya peraturan Bupati sebagai turunan Perda RTRW
 3. Belum maksimalnya sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan Penataan Ruang
 4. Belum maksimalnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- d. Isu Strategis Bidang Cipta Karya
1. Menurunnya Penyelenggaraan air minum
 2. Menurunnya Penyelenggaraan air limbah
 3. Menurunnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan bangunan dan gedung negara
 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan dan lingkungan.
 5. Meningkatkan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- e. Isu Strategis Bidang Jasa Konstruksi
1. Masih kurangnya tenaga terampil konstruksi di Kabupaten Tapin
 2. Belum terlaksananya pengawasan jasa konstruksi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2029. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan	Meningkatkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 3.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran	Indikator
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah)
Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR (Rencana Tata Ruang
Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	Persentase kemantapan jalan kabupaten
	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
	Persentase Sambungan Rumah yang terlayani akses air minum layak

Meningkatnya Infrastruktur Dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase rumah tangga yang terlayani akses air limbah
Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik
	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur
Meningkatnya penyelenggaraan Bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung yang berfungsi baik(%)
	Persentase Bangunan Lingkungan yang berfungsi baik(%)
Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
- meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan	Meningkatkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum† (IIPU) (Angka)	-	70	72	74	76	78	80	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Skor)	72.15	90	91	91	92	92	93	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	66.16	70	75	80	85	90	95	
		Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase Sambungan Rumah yang terlayani akses air† minum† layak (%)	75.20	76	76.5	77	77.5	78	78.5	
			Persentase rumah tangga yang terlayani akses† air† limbah (%)	88.83	89	89.5	90	90.5	91	91.5	
		Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR (Rencana Tata Ruang) (%)	-	80	83	85	87	89	91	
		Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	Persentase kemantapan jalan kabupaten (%)	57.05	67	68	69	70	72	73	
			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	40	43	45	47	48	50	
		Meningkatnya infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi oleh† Infrastruktur (%)	62	64	66	68	70	72	74	
			Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi† Baik (%)	49	50	51	52	53	54	55	
		Meningkatnya penyelenggaraan Bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung yang berfungsi† baik (%)	65	65.5	66	66.5	67	67.5	68	
			Persentase Bangunan Lingkungan yang berfungsi† baik (%)	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	
		Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.3 Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (Tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tapin 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	1. Peningkatan Kualitas dan Kelengkapan Dokumen Rencana Tata Ruang 2. Penguatan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3. Peningkatan Keterpaduan Pemanfaatan Ruang dan Partisipasi Publik	1. Percepatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital 2. Peningkatan Kualitas Muatan Rencana Tata Ruang yang Adaptif dan Mitigatif 3. Optimalisasi Instrumen KKPR sebagai Pintu Utama Perizinan Berusaha dan Non-Berusaha 4. Penerapan Sanksi, Insentif, dan Disinsentif secara Konsisten 5. Menjadikan Rencana Tata Ruang sebagai Acuan Utama dalam Perencanaan Pembangunan Sektoral 6. Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Akses Publik terhadap Data Tata Ruang

Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	1. Prioritas pada Preservasi Jalan 2. Penanganan Sesuai Kondisi (Long-Term Pavement Performance - LTPP) 3. Penerapan Sistem Manajemen Aset Jalan (Road Asset Management System) 4. Inovasi Teknologi dan Material	1. Memprioritaskan Anggaran untuk Preservasi pada Ruas Strategis 2. Percepatan Penanganan Ruas Kritis dan Terisolir 3. Penguatan Sistem Manajemen Aset dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data
Meningkatnya Infrastruktur Dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	1. Perluasan Jaringan Perpipaan air minum 2. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Komprehensif dan Terpadu 3. Meningkatkan Efektivitas dan Cakupan Pelayanan	1. Memprioritaskan perluasan jaringan air minum dan memberikan kemudahan sambungan baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani (<i>blank spot</i>) 2. Prioritas Pembangunan dan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Kawasan Perkotaan Padat 3. Penguatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) melalui Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) 4. Perlindungan Kualitas Badan Air dari Pencemaran Limbah Domestik
Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	1. Peningkatan Konservasi dan Ketahanan Sumber Daya Air 2. Optimalisasi Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Kesejahteraan 3. Pengurangan Risiko Bencana Akibat Daya Rusak Air	1. Melindungi dan Merehabilitasi Sumber-sumber Air serta Daerah Tangkapan Air 2. Memperbanyak dan Memelihara Bangunan Tampung Air 3. Meningkatkan Keandalan dan Fungsi Jaringan Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan 4. Mengembangkan Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Rawan

Meningkatnya penyelenggaraan Bangunan gedung dan lingkungannya	1. Peningkatan Kualitas, Keandalan, dan Ketaatan Bangunan Gedung	1. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Standar Teknis melalui Sistem Perizinan yang Andal 2. Memperkuat Pengawasan Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung 3. Mendorong Penerapan Prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH)
Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan konstruksi	1. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) secara Merata 2. Penguatan Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Perlindungan Tenaga Kerja 3. Penguatan Sinergi dan Kemitraan Multipihak (Pentahelix)	1. Percepatan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) sebagai Standar Pengakuan Formal 2. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi yang Relevan dengan Kebutuhan 3. Menjadikan K3 sebagai Prioritas Utama dalam Setiap Penyelenggaraan Konstruksi 4. Mendorong Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Konstruksi 5. Membangun Ekosistem Pembinaan Jasa Konstruksi yang Terintegrasi 6. Peningkatan Akurasi dan Pemanfaatan Basis Data Jasa Konstruksi.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 2024-2026, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 3 (Tiga) tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 4.1 (Terlampir).

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 2024-2029, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

BUPATI TAPIN,

YAMANI

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					146.097.133.272,00		154.027.583.425,00		163.802.724.646,00		167.898.952.724,00		175.332.572.595,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.000.000.000,00		12.069.549.847,00		13.069.549.847,00		13.469.549.847,00		13.969.549.847,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Skor)	72.15	90	91	7.400.500.000,00	91	9.719.949.847,00	92	10.669.849.847,00	92	10.769.749.847,00	92	11.219.649.847,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	66.16	70	75	2.599.500.000,00	80	2.349.600.000,00	85	2.399.700.000,00	90	2.699.800.000,00	95	2.749.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					24.180.000.000,00		25.580.000.000,00		26.180.000.000,00		26.563.228.078,00		27.593.847.949,00	
Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	Persentase Daerah Irigasi dalam KondisiÂ Baik (%)	49	50	51	24.180.000.000,00	52	25.580.000.000,00	53	26.180.000.000,00	54	26.563.228.078,00	55	27.593.847.949,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi olehÂ Infrastruktur (%)	62	64	66		68		70		72		74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					10.450.000.000,00		11.350.000.000,00		12.350.000.000,00		13.350.000.000,00		14.333.000.000,00	
Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase Sambungan Rumah yang terlayani akses airÂ minumÂ layak (%)	75.20	76	76.5	10.450.000.000,00	77	11.350.000.000,00	77.5	12.350.000.000,00	78	13.350.000.000,00	78.5	14.333.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					5.043.000.000,00		5.343.000.000,00		6.343.000.000,00		6.943.000.000,00		7.243.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pembuangan sampah	Persentase ketersediaan tempat pembuangan sampah yang berkualitasÂ sesuaiÂ standar (%)	100	100	100	5.043.000.000,00	100	5.343.000.000,00	100	6.343.000.000,00	100	6.943.000.000,00	100	7.243.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					5.421.000.000,00		5.621.000.000,00		6.496.141.221,00		6.996.141.221,00		7.596.141.221,00	
Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase rumah tangga yang terlayani aksesÂ airÂ limbah (%)	88.83	89	89.5	5.421.000.000,00	90	5.621.000.000,00	90.5	6.496.141.221,00	91	6.996.141.221,00	91.5	7.596.141.221,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					5.970.000.000,00		7.070.000.000,00		7.270.000.000,00		7.370.000.000,00		7.970.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	40	43	5.970.000.000,00	45	7.070.000.000,00	47	7.270.000.000,00	48	7.370.000.000,00	50	7.970.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					31.971.983.272,00		32.171.983.272,00		33.571.983.272,00		33.871.983.272,00		34.871.983.272,00	
Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung yang berfungsiÂ baik (%)	65	65.5	66	31.971.983.272,00	66.5	32.171.983.272,00	67	33.571.983.272,00	67.5	33.871.983.272,00	68	34.871.983.272,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					5.825.500.000,00		6.025.500.000,00		6.825.500.000,00		7.225.500.000,00		8.225.500.000,00	
Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase Bangunan Lingkungan yang berfungsiÂ baik (%)	22	22.5	23	5.825.500.000,00	23.5	6.025.500.000,00	24	6.825.500.000,00	24.5	7.225.500.000,00	25	8.225.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					40.887.650.000,00		42.248.550.306,00		44.048.550.306,00		44.228.550.306,00		45.028.550.306,00	
Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	Persentase kemantapan jalan kabupaten (%)	57.05	67	68	40.887.650.000,00	69	42.248.550.306,00	70	44.048.550.306,00	72	44.228.550.306,00	73	45.028.550.306,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					478.000.000,00		498.000.000,00		578.000.000,00		611.000.000,00		731.000.000,00	
Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	100	100	100	478.000.000,00	100	498.000.000,00	100	578.000.000,00	100	611.000.000,00	100	731.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					5.870.000.000,00		6.050.000.000,00		7.070.000.000,00		7.270.000.000,00		7.770.000.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR (Rencana Tata Ruang) (%)	100	100	100	5.870.000.000,00	100	6.050.000.000,00	100	7.070.000.000,00	100	7.270.000.000,00	100	7.770.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
TOTAL KESELURUHAN					146.097.133.272,00		154.027.583.425,00		163.802.724.646,00		167.898.952.724,00		175.332.572.595,00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
- meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan	Meningkatkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum				Indeks Infrastruktur Pekerjaan UmumÂ (IIPU)		
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Meningkatnya profesionalitas ASN Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat			Persentase Sambungan Rumah yang terlayani akses airÂ minumÂ layak		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat		Persentase rumah tangga yang terlayani aksesÂ airÂ limbah		
					Persentase rumah tangga yang terlayani aksesÂ airÂ limbah	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Meningkatnya Penyelenggaraan air limbah	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	1.03.05.2.01.0020 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
		Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Terselenggaranya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR (Rencana Tata Ruang)		
					Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR (Rencana Tata Ruang)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data SHP Peta Dasar	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah data SHP Peta Dasar	1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
				Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0005 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
					Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
					Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1.03.12.2.04.0011 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR	
					Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	1.03.12.2.04.0013 - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
					Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap			Persentase kemantapan jalan kabupaten		
					Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik		
		Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Meningkatnya penyelenggaraan jaringan drainase jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1.03.06.2.01.0020 - Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	1.03.06.2.01.0022 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya infrastruktur Sumber Daya Air			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
					Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur		
					Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik		
			Meningkatnya infrastruktur sumber daya air		Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) untuk Mencegah Daya Rusak Air	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	1.03.02.2.01.0100 - Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1.03.02.2.01.0125 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
				Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dengan Luas di Bawah 1.000 Ha	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
		Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah			Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Meningkatnya kualitas administrasi dan kompetensi jasa konstruksi yang memenuhi syarat administrasi dan kompetensi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelengga ra Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1.03.11.2.01.0009 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1.03.11.2.01.0013 - Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1.03.11.2.01.0015 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Meningkatnya kualitas administrasi dan kompetensi jasa konstruksi yang memenuhi syarat administrasi dan kompetensi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
				Meningkatnya kualitas administrasi dan kompetensi jasa konstruksi yang memenuhi syarat administrasi dan kompetensi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				146.097.133.272,00		154.027.583.425,00		163.802.724.646,00		167.898.952.724,00		175.332.572.595,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.000.000.000,00		12.069.549.847,00		13.069.549.847,00		13.469.549.847,00		13.969.549.847,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	72.15	91	7.400.500.000,00	91	9.719.949.847,00	92	10.669.849.847,00	92	10.769.749.847,00	92	11.219.649.847,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				102.500.000,00		105.977.496,00		155.977.496,00		175.977.496,00		200.977.496,00		
Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	102.500.000,00	1	105.977.496,00	1	155.977.496,00	1	175.977.496,00	1	200.977.496,00		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1				1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1				1		1		1			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.000.000,00		103.477.496,00		153.477.496,00		173.477.496,00		198.477.496,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	100.000.000,00	1	103.477.496,00	1	153.477.496,00	1	173.477.496,00	1	198.477.496,00		
1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.298.000.000,00		9.613.972.351,00		10.513.872.351,00		10.593.772.351,00		11.018.672.351,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	7.298.000.000,00	1	9.613.972.351,00	1	10.513.872.351,00	1	10.593.772.351,00	1	11.018.672.351,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	80		82		85		88		90			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4		4		4		4		4			
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.252.300.000,00		9.565.043.853,00		10.463.383.853,00		10.542.659.853,00		10.966.779.853,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	80	7.252.300.000,00	82	9.565.043.853,00	85	10.463.383.853,00	88	10.542.659.853,00	90	10.966.779.853,00		
1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				7.200.000,00		8.690.076,00		9.410.076,00		9.698.076,00		10.058.076,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	7.200.000,00	1	8.690.076,00	1	9.410.076,00	1	9.698.076,00	1	10.058.076,00		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.050.000,00	1	5.050.000,00	1	5.050.000,00	1	5.050.000,00	1	5.050.000,00		
1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	5.050.000,00	1	5.050.000,00	1	5.050.000,00	1	5.050.000,00	1	5.050.000,00		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				8.400.000,00		10.138.422,00		10.978.422,00		11.314.422,00		11.734.422,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	8.400.000,00	1	10.138.422,00	1	10.978.422,00	1	11.314.422,00	1	11.734.422,00		
Meningkatnya profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	66.16	75	2.599.500.000,00	80	2.349.600.000,00	85	2.399.700.000,00	90	2.699.800.000,00	95	2.749.900.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.500.000,00		2.600.000,00		2.700.000,00		2.800.000,00		2.900.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	2.500.000,00	1	2.600.000,00	1	2.700.000,00	1	2.800.000,00	1	2.900.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1				1		1		1			
1.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.500.000,00		1.600.000,00		1.700.000,00		1.800.000,00		1.900.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1.500.000,00	1	1.600.000,00	1	1.700.000,00	1	1.800.000,00	1	1.900.000,00		
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				800.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		900.000.000,00		950.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	2	800.000.000,00	1	550.000.000,00	1	600.000.000,00	2	900.000.000,00	2	950.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	115	30				30		30		30			
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				500.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	2	500.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00		
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	115	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00	30	350.000.000,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1				1		1					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1				1		1					
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.495.000.000,00		1.495.000.000,00		1.495.000.000,00		1.495.000.000,00		1.495.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	1.495.000.000,00	1	1.495.000.000,00	1	1.495.000.000,00	1	1.495.000.000,00	1	1.495.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	10		10		10		10					
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	1		1		1		1					
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				1.045.000.000,00		1.045.000.000,00		1.045.000.000,00		1.045.000.000,00		1.045.000.000,00		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	1	1.045.000.000,00	1	1.045.000.000,00	1	1.045.000.000,00	1	1.045.000.000,00	1	1.045.000.000,00		
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172.000.000,00		172.000.000,00		172.000.000,00		172.000.000,00		172.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	172.000.000,00	1	172.000.000,00	1	172.000.000,00	1	172.000.000,00	1	172.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1					
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				24.180.000.000,00		25.580.000.000,00		26.180.000.000,00		26.563.228.078,00		27.593.847.949,00		
Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	Persentase Daerah Irigasi dalam KondisiÂ Baik	49	51	24.180.000.000,00	52	25.580.000.000,00	53	26.180.000.000,00	54	26.563.228.078,00	55	27.593.847.949,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi olehÂ Infrastruktur	62	66		68		70		72		74			
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				21.278.400.000,00		22.510.400.000,00		23.038.400.000,00		23.375.640.708,00		24.282.586.196,00		
Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) untuk Mencegah Daya Rusak Air	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	3	1	21.278.400.000,00	1	22.510.400.000,00	1	23.038.400.000,00	1	23.375.640.708,00	1	24.282.586.196,00		
	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	90	10		10		10		10		10			
	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	15	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	10	15		15		15		15		15			
	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	103	10		10		10		10		10			
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	107	50		50		50		50		50			
	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	5	1		1		1		1		1			
	1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai						425.568.000,00				450.208.000,00			
Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	103	10	425.568.000,00	10	450.208.000,00	10	460.768.000,00	10	467.512.814,00	10	485.651.724,00		
1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				638.352.000,00		675.312.000,00		691.152.000,00		701.269.221,00		728.477.586,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	5	1	638.352.000,00	1	675.312.000,00	1	691.152.000,00	1	701.269.221,00	1	728.477.586,00		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				17.022.720.000,00		18.008.320.000,00		18.430.720.000,00		18.700.512.567,00		19.426.068.956,00		
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	107	50	17.022.720.000,00	50	18.008.320.000,00	50	18.430.720.000,00	50	18.700.512.567,00	50	19.426.068.956,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.01.0100 - Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				638.352.000,00		675.312.000,00		691.152.000,00		701.269.221,00		728.477.586,00		
Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	90	10	638.352.000,00	10	675.312.000,00	10	691.152.000,00	10	701.269.221,00	10	728.477.586,00		
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				851.136.000,00		900.416.000,00		921.536.000,00		935.025.628,00		971.303.448,00		
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	3	1	851.136.000,00	1	900.416.000,00	1	921.536.000,00	1	935.025.628,00	1	971.303.448,00		
1.03.02.2.01.0125 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				1.276.704.000,00		1.350.624.000,00		1.382.304.000,00		1.402.538.443,00		1.456.955.172,00		
Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	15	5	1.276.704.000,00	5	1.350.624.000,00	5	1.382.304.000,00	5	1.402.538.443,00	5	1.456.955.172,00		
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				425.568.000,00		450.208.000,00		460.768.000,00		467.512.814,00		485.651.724,00		
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	10	15	425.568.000,00	15	450.208.000,00	15	460.768.000,00	15	467.512.814,00	15	485.651.724,00		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.901.600.000,00		3.069.600.000,00		3.141.600.000,00		3.187.587.370,00		3.311.261.753,00		
Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dengan Luas di Bawah 1.000 Ha	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5	2	2.901.600.000,00	2	3.069.600.000,00	2	3.141.600.000,00	2	3.187.587.370,00	2	3.311.261.753,00		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	5	6		6		6		6		6			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	18	18		18		18		18		18			
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				290.160.000,00		306.960.000,00		314.160.000,00		318.758.737,00		331.126.175,00		
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	5	6	290.160.000,00	6	306.960.000,00	6	314.160.000,00	6	318.758.737,00	6	331.126.175,00		
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				2.031.120.000,00		2.148.720.000,00		2.199.120.000,00		2.231.311.159,00		2.317.883.227,00		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5	2	2.031.120.000,00	2	2.148.720.000,00	2	2.199.120.000,00	2	2.231.311.159,00	2	2.317.883.227,00		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				580.320.000,00		613.920.000,00		628.320.000,00		637.517.474,00		662.252.351,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	18	18	580.320.000,00	18	613.920.000,00	18	628.320.000,00	18	637.517.474,00	18	662.252.351,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				10.450.000.000,00		11.350.000.000,00		12.350.000.000,00		13.350.000.000,00		14.333.000.000,00		
Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase Sambungan Rumah yang terlayani akses airÂ minumÂ layak	75.20	76.5	10.450.000.000,00	77	11.350.000.000,00	77.5	12.350.000.000,00	78	13.350.000.000,00	78.5	14.333.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				10.450.000.000,00		11.350.000.000,00		12.350.000.000,00		13.350.000.000,00		14.333.000.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan air minum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1	1	10.450.000.000,00	1	11.350.000.000,00	1	12.350.000.000,00	1	13.350.000.000,00	1	14.333.000.000,00		
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000	1000		1000		1000		1000		1000			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	45	21		22		23		24		25			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	50	50		50		50		50		50			
	1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						3.030.500.000,00				3.291.500.000,00			
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	45	21	3.030.500.000,00	22	3.291.500.000,00	23	3.581.500.000,00	24	3.871.500.000,00	25	4.156.570.000,00		
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				3.135.000.000,00		3.405.000.000,00		3.705.000.000,00		4.005.000.000,00		4.299.900.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1	1	3.135.000.000,00	1	3.405.000.000,00	1	3.705.000.000,00	1	4.005.000.000,00	1	4.299.900.000,00		
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.045.000.000,00		1.135.000.000,00		1.235.000.000,00		1.335.000.000,00		1.433.300.000,00		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1	1	1.045.000.000,00	1	1.135.000.000,00	1	1.235.000.000,00	1	1.335.000.000,00	1	1.433.300.000,00		
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				522.500.000,00		567.500.000,00		617.500.000,00		667.500.000,00		716.650.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	50	50	522.500.000,00	50	567.500.000,00	50	617.500.000,00	50	667.500.000,00	50	716.650.000,00		
1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				836.000.000,00		908.000.000,00		988.000.000,00		1.068.000.000,00		1.146.640.000,00		
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	30	30	836.000.000,00	30	908.000.000,00	30	988.000.000,00	30	1.068.000.000,00	30	1.146.640.000,00		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				836.000.000,00		908.000.000,00		988.000.000,00		1.068.000.000,00		1.146.640.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000	1000	836.000.000,00	1000	908.000.000,00	1000	988.000.000,00	1000	1.068.000.000,00	1000	1.146.640.000,00		
1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				1.045.000.000,00		1.135.000.000,00		1.235.000.000,00		1.335.000.000,00		1.433.300.000,00		
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	50	50	1.045.000.000,00	50	1.135.000.000,00	50	1.235.000.000,00	50	1.335.000.000,00	50	1.433.300.000,00		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				5.043.000.000,00		5.343.000.000,00		6.343.000.000,00		6.943.000.000,00		7.243.000.000,00		
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pembuangan sampah	Persentase ketersediaan tempat pembuangan sampah yang berkualitas sesuai standar	100	100	5.043.000.000,00	100	5.343.000.000,00	100	6.343.000.000,00	100	6.943.000.000,00	100	7.243.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				5.043.000.000,00		5.343.000.000,00		6.343.000.000,00		6.943.000.000,00		7.243.000.000,00		
Terlaksananya pembangunan tempat pembuangan sampah	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1	1	5.043.000.000,00	1	5.343.000.000,00	1	6.343.000.000,00	1	6.943.000.000,00	1	7.243.000.000,00		
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1	1		1		1		1					
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1	1		1		1		1					
1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				1.512.900.000,00		1.602.900.000,00		1.902.900.000,00		2.082.900.000,00		2.172.900.000,00		
Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1	1	1.512.900.000,00	1	1.602.900.000,00	1	1.902.900.000,00	1	2.082.900.000,00	1	2.172.900.000,00		
1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				1.765.050.000,00		1.870.050.000,00		2.220.050.000,00		2.430.050.000,00		2.535.050.000,00		
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1	1	1.765.050.000,00	1	1.870.050.000,00	1	2.220.050.000,00	1	2.430.050.000,00	1	2.535.050.000,00		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				1.765.050.000,00		1.870.050.000,00		2.220.050.000,00		2.430.050.000,00		2.535.050.000,00		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1	1	1.765.050.000,00	1	1.870.050.000,00	1	2.220.050.000,00	1	2.430.050.000,00	1	2.535.050.000,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5.421.000.000,00		5.621.000.000,00		6.496.141.221,00		6.996.141.221,00		7.596.141.221,00		
Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase rumah tangga yang terlayani akses air limbah	88.83	89.5	5.421.000.000,00	90	5.621.000.000,00	90.5	6.496.141.221,00	91	6.996.141.221,00	91.5	7.596.141.221,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.421.000.000,00		5.621.000.000,00		6.496.141.221,00		6.996.141.221,00		7.596.141.221,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan air limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	20	80	5.421.000.000,00	80	5.621.000.000,00	80	6.496.141.221,00	80	6.996.141.221,00	80	7.596.141.221,00		
	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	500	500		500		500		500		500			
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	20	80		80		80		80		80			
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	200	200		200		200		200		200			
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	20	80		80		80		80		80			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	20	80		80		80		80		80			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1	1		1		1		1		1			
1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				867.360.000,00		899.360.000,00		1.039.382.596,00		1.119.382.596,00		1.215.382.596,00		
Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1	1	867.360.000,00	1	899.360.000,00	1	1.039.382.596,00	1	1.119.382.596,00	1	1.215.382.596,00		
1.03.05.2.01.0020 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				758.940.000,00		786.940.000,00		909.459.771,00		979.459.771,00		1.063.459.771,00		
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	20	80	758.940.000,00	80	786.940.000,00	80	909.459.771,00	80	979.459.771,00	80	1.063.459.771,00		
1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				704.730.000,00		730.730.000,00		844.498.359,00		909.498.359,00		987.498.359,00		
Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	20	80	704.730.000,00	80	730.730.000,00	80	844.498.359,00	80	909.498.359,00	80	987.498.359,00		
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				813.150.000,00		843.150.000,00		974.421.183,00		1.049.421.183,00		1.139.421.183,00		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1	1	813.150.000,00	1	843.150.000,00	1	974.421.183,00	1	1.049.421.183,00	1	1.139.421.183,00		
1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				650.520.000,00		674.520.000,00		779.536.947,00		839.536.947,00		911.536.947,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	20	80	650.520.000,00	80	674.520.000,00	80	779.536.947,00	80	839.536.947,00	80	911.536.947,00			
1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				596.310.000,00		618.310.000,00		714.575.534,00		769.575.534,00		835.575.534,00			
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	20	80	596.310.000,00	80	618.310.000,00	80	714.575.534,00	80	769.575.534,00	80	835.575.534,00			
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				542.100.000,00		562.100.000,00		649.614.122,00		699.614.122,00		759.614.122,00			
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	200	200	542.100.000,00	200	562.100.000,00	200	649.614.122,00	200	699.614.122,00	200	759.614.122,00			
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				487.890.000,00		505.890.000,00		584.652.709,00		629.652.709,00		683.652.709,00			
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	500	500	487.890.000,00	500	505.890.000,00	500	584.652.709,00	500	629.652.709,00	500	683.652.709,00			
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				5.970.000.000,00		7.070.000.000,00		7.270.000.000,00		7.370.000.000,00		7.970.000.000,00			
Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	-	43	5.970.000.000,00	45	7.070.000.000,00	47	7.270.000.000,00	48	7.370.000.000,00	50	7.970.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.970.000.000,00		7.070.000.000,00		7.270.000.000,00		7.370.000.000,00		7.970.000.000,00			
Meningkatnya penyelenggaraan jaringan drainase jalan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000	1500	5.970.000.000,00	2000	7.070.000.000,00	2000	7.270.000.000,00	2000	7.370.000.000,00	2000	7.970.000.000,00			
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1000	1000		1000		1000		1000		1000				
	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	10	10		10		10		10		10				
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1000	1000		2000		20000		2000		2000				
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	10	10		10		10		10		10			10	
	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						1.791.000.000,00				2.121.000.000,00				2.181.000.000,00
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000	1500	1.791.000.000,00	2000	2.121.000.000,00	2000	2.181.000.000,00	2000	2.211.000.000,00	2000	2.391.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				895.500.000,00		1.060.500.000,00		1.090.500.000,00		1.105.500.000,00		1.195.500.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1000	1000	895.500.000,00	2000	1.060.500.000,00	20000	1.090.500.000,00	2000	1.105.500.000,00	2000	1.195.500.000,00		
1.03.06.2.01.0020 - Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan				597.000.000,00		707.000.000,00		727.000.000,00		737.000.000,00		797.000.000,00		
Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1000	1000	597.000.000,00	1000	707.000.000,00	1000	727.000.000,00	1000	737.000.000,00	1000	797.000.000,00		
1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan				1.492.500.000,00		1.767.500.000,00		1.817.500.000,00		1.842.500.000,00		1.992.500.000,00		
Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	10	10	1.492.500.000,00	10	1.767.500.000,00	10	1.817.500.000,00	10	1.842.500.000,00	10	1.992.500.000,00		
1.03.06.2.01.0022 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan				776.100.000,00		919.100.000,00		945.100.000,00		958.100.000,00		1.036.100.000,00		
Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	10	10	776.100.000,00	10	919.100.000,00	10	945.100.000,00	10	958.100.000,00	10	1.036.100.000,00		
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				417.900.000,00		494.900.000,00		508.900.000,00		515.900.000,00		557.900.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1	1	417.900.000,00	1	494.900.000,00	1	508.900.000,00	1	515.900.000,00	1	557.900.000,00		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				31.971.983.272,00		32.171.983.272,00		33.571.983.272,00		33.871.983.272,00		34.871.983.272,00		
Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung yang berfungsiÂ baik	65	66	31.971.983.272,00	66.5	32.171.983.272,00	67	33.571.983.272,00	67.5	33.871.983.272,00	68	34.871.983.272,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				31.971.983.272,00		32.171.983.272,00		33.571.983.272,00		33.871.983.272,00		34.871.983.272,00		
Terselenggaranya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50	50	31.971.983.272,00	50	32.171.983.272,00	50	33.571.983.272,00	50	33.871.983.272,00	50	34.871.983.272,00		
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1					
	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				15.666.271.803,00		15.764.271.803,00		16.450.271.803,00		16.597.271.803,00		17.087.271.803,00		
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	1	15.666.271.803,00	1	15.764.271.803,00	1	16.450.271.803,00	1	16.597.271.803,00	1	17.087.271.803,00		
1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung				3.516.918.160,00		3.538.918.160,00		3.692.918.160,00		3.725.918.160,00		3.835.918.160,00		
Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	100	100	3.516.918.160,00	100	3.538.918.160,00	100	3.692.918.160,00	100	3.725.918.160,00	100	3.835.918.160,00		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				12.788.793.309,00		12.868.793.309,00		13.428.793.309,00		13.548.793.309,00		13.948.793.309,00		
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50	50	12.788.793.309,00	50	12.868.793.309,00	50	13.428.793.309,00	50	13.548.793.309,00	50	13.948.793.309,00		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				5.825.500.000,00		6.025.500.000,00		6.825.500.000,00		7.225.500.000,00		8.225.500.000,00		
Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase Bangunan Lingkungan yang berfungsiA baik	22	23	5.825.500.000,00	23.5	6.025.500.000,00	24	6.825.500.000,00	24.5	7.225.500.000,00	25	8.225.500.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				5.825.500.000,00		6.025.500.000,00		6.825.500.000,00		7.225.500.000,00		8.225.500.000,00		
Terselenggaranya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2	2	5.825.500.000,00	3	6.025.500.000,00	3	6.825.500.000,00	3	7.225.500.000,00	3	8.225.500.000,00		
	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	-	20		20		20		20		20			
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				5.242.950.000,00		5.422.950.000,00		6.142.950.000,00		6.502.950.000,00		7.402.950.000,00		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2	2	5.242.950.000,00	3	5.422.950.000,00	3	6.142.950.000,00	3	6.502.950.000,00	3	7.402.950.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				582.550.000,00		602.550.000,00		682.550.000,00		722.550.000,00		822.550.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	-	20	582.550.000,00	20	602.550.000,00	20	682.550.000,00	20	722.550.000,00	20	822.550.000,00		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				40.887.650.000,00		42.248.550.306,00		44.048.550.306,00		44.228.550.306,00		45.028.550.306,00		
Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	Persentase kemantapan jalan kabupaten	57.05	68	40.887.650.000,00	69	42.248.550.306,00	70	44.048.550.306,00	72	44.228.550.306,00	73	45.028.550.306,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				40.887.650.000,00		42.248.550.306,00		44.048.550.306,00		44.228.550.306,00		45.028.550.306,00		
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1	1	40.887.650.000,00	1	42.248.550.306,00	1	44.048.550.306,00	1	44.228.550.306,00	1	45.028.550.306,00		
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20	20		20		20		20		20			
	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	100	100		100		100		100		100			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	591	591		591		591		591		591			
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	5	5		5		5		5		5			
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	10	10		10		10		10		10			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	10	10		10		10		10		10			
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	100	100		100		100		100		100			
	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	50	50		50		50		50		50			
	Panjang jembatan yang dibangun	30	30		30		30		30		30			
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10	10		10		10		10		10			
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10	10		10		10		10		10			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10	10		10		10		10		10			
	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						1.635.506.000,00				1.689.942.013,00			
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1	1	1.635.506.000,00	1	1.689.942.013,00	1	1.761.942.013,00	1	1.769.142.013,00	1	1.801.142.013,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				1.226.629.500,00		1.267.456.509,00		1.321.456.509,00		1.326.856.509,00		1.350.856.509,00		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	591	591	1.226.629.500,00	591	1.267.456.509,00	591	1.321.456.509,00	591	1.326.856.509,00	591	1.350.856.509,00		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				6.133.147.500,00		6.337.282.546,00		6.607.282.546,00		6.634.282.546,00		6.754.282.546,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10	10	6.133.147.500,00	10	6.337.282.546,00	10	6.607.282.546,00	10	6.634.282.546,00	10	6.754.282.546,00		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				4.497.641.500,00		4.647.340.534,00		4.845.340.534,00		4.865.140.534,00		4.953.140.534,00		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	5	5	4.497.641.500,00	5	4.647.340.534,00	5	4.845.340.534,00	5	4.865.140.534,00	5	4.953.140.534,00		
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				2.044.382.500,00		2.112.427.515,00		2.202.427.515,00		2.211.427.515,00		2.251.427.515,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10	10	2.044.382.500,00	10	2.112.427.515,00	10	2.202.427.515,00	10	2.211.427.515,00	10	2.251.427.515,00		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				2.044.382.500,00		2.112.427.515,00		2.202.427.515,00		2.211.427.515,00		2.251.427.515,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	10	10	2.044.382.500,00	10	2.112.427.515,00	10	2.202.427.515,00	10	2.211.427.515,00	10	2.251.427.515,00		
1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan				4.906.518.000,00		5.069.826.037,00		5.285.826.037,00		5.307.426.037,00		5.403.426.037,00		
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	50	50	4.906.518.000,00	50	5.069.826.037,00	50	5.285.826.037,00	50	5.307.426.037,00	50	5.403.426.037,00		
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				4.497.641.500,00		4.647.340.534,00		4.845.340.534,00		4.865.140.534,00		4.953.140.534,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	100	100	4.497.641.500,00	100	4.647.340.534,00	100	4.845.340.534,00	100	4.865.140.534,00	100	4.953.140.534,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				2.453.259.000,00		2.534.913.018,00		2.642.913.018,00		2.653.713.018,00		2.701.713.018,00		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10	10	2.453.259.000,00	10	2.534.913.018,00	10	2.642.913.018,00	10	2.653.713.018,00	10	2.701.713.018,00		
1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				2.044.382.500,00		2.112.427.515,00		2.202.427.515,00		2.211.427.515,00		2.251.427.515,00		
Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	100	100	2.044.382.500,00	100	2.112.427.515,00	100	2.202.427.515,00	100	2.211.427.515,00	100	2.251.427.515,00		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.226.629.500,00		1.267.456.509,00		1.321.456.509,00		1.326.856.509,00		1.350.856.509,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20	20	1.226.629.500,00	20	1.267.456.509,00	20	1.321.456.509,00	20	1.326.856.509,00	20	1.350.856.509,00		
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar				5.315.394.500,00		5.492.311.540,00		5.726.311.540,00		5.749.711.540,00		5.853.711.540,00		
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	10	10	5.315.394.500,00	10	5.492.311.540,00	10	5.726.311.540,00	10	5.749.711.540,00	10	5.853.711.540,00		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				2.862.135.500,00		2.957.398.521,00		3.083.398.521,00		3.095.998.521,00		3.151.998.521,00		
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	30	30	2.862.135.500,00	30	2.957.398.521,00	30	3.083.398.521,00	30	3.095.998.521,00	30	3.151.998.521,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				478.000.000,00		498.000.000,00		578.000.000,00		611.000.000,00		731.000.000,00		
Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Rasio tenaga operator/tekhnisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	478.000.000,00	100	498.000.000,00	100	578.000.000,00	100	611.000.000,00	100	731.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan	100	100		100		100		100		100				
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				239.000.000,00		249.000.000,00		289.000.000,00		305.500.000,00		365.500.000,00			
Meningkatnya kualitas administrasi dan kompetensi jasa konstruksi yang memenuhi syarat administrasi dan kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya	100	100	239.000.000,00	100	249.000.000,00	100	289.000.000,00	100	305.500.000,00	100	365.500.000,00			
	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	0	5				5				5				5
	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	2	1				1				1				1
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1				1				1				1
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1	1				1				1				1
	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1	1				1				1				1
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100	20				20				20				20
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50	100				100				100				100
	1.03.11.2.01.0009 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						105.160.000,00				109.560.000,00				127.160.000,00
Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1	1	105.160.000,00	1	109.560.000,00	1	127.160.000,00	1	134.420.000,00	1	160.820.000,00			
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				4.780.000,00		4.980.000,00		5.780.000,00		6.110.000,00		7.310.000,00			
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50	100	4.780.000,00	100	4.980.000,00	100	5.780.000,00	100	6.110.000,00	100	7.310.000,00			
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				7.170.000,00		7.470.000,00		8.670.000,00		9.165.000,00		10.965.000,00			
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1	7.170.000,00	1	7.470.000,00	1	8.670.000,00	1	9.165.000,00	1	10.965.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				31.070.000,00		32.370.000,00		37.570.000,00		39.715.000,00		47.515.000,00		
Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	2	1	31.070.000,00	1	32.370.000,00	1	37.570.000,00	1	39.715.000,00	1	47.515.000,00		
1.03.11.2.01.0013 - Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				11.950.000,00		12.450.000,00		14.450.000,00		15.275.000,00		18.275.000,00		
Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1	1	11.950.000,00	1	12.450.000,00	1	14.450.000,00	1	15.275.000,00	1	18.275.000,00		
1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				16.730.000,00		17.430.000,00		20.230.000,00		21.385.000,00		25.585.000,00		
Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	100	100	16.730.000,00	100	17.430.000,00	100	20.230.000,00	100	21.385.000,00	100	25.585.000,00		
1.03.11.2.01.0015 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				7.170.000,00		7.470.000,00		8.670.000,00		9.165.000,00		10.965.000,00		
Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	0	5	7.170.000,00	5	7.470.000,00	5	8.670.000,00	5	9.165.000,00	5	10.965.000,00		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				54.970.000,00		57.270.000,00		66.470.000,00		70.265.000,00		84.065.000,00		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100	20	54.970.000,00	20	57.270.000,00	20	66.470.000,00	20	70.265.000,00	20	84.065.000,00		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				95.600.000,00		99.600.000,00		115.600.000,00		122.200.000,00		146.200.000,00		
Meningkatnya kualitas administrasi dan kompetensi jasa konstruksi yang memenuhi syarat administrasi dan kompetensi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1	1	95.600.000,00	1	99.600.000,00	1	115.600.000,00	1	122.200.000,00	1	146.200.000,00		
	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	0	1		1		1		1		1			
1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				19.120.000,00		19.920.000,00		23.120.000,00		24.440.000,00		29.240.000,00		
Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	0	1	19.120.000,00	1	19.920.000,00	1	23.120.000,00	1	24.440.000,00	1	29.240.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				28.680.000,00		29.880.000,00		34.680.000,00		36.660.000,00		43.860.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1	1	28.680.000,00	1	29.880.000,00	1	34.680.000,00	1	36.660.000,00	1	43.860.000,00		
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI				19.120.000,00		19.920.000,00		23.120.000,00		24.440.000,00		29.240.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	5	19.120.000,00	5	19.920.000,00	5	23.120.000,00	5	24.440.000,00	5	29.240.000,00		
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				28.680.000,00		29.880.000,00		34.680.000,00		36.660.000,00		43.860.000,00		
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	0	1	28.680.000,00	1	29.880.000,00	1	34.680.000,00	1	36.660.000,00	1	43.860.000,00		
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				143.400.000,00		149.400.000,00		173.400.000,00		183.300.000,00		219.300.000,00		
Meningkatnya kualitas administrasi dan kompetensi jasa konstruksi yang memenuhi syarat administrasi dan kompetensi	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	0	4	143.400.000,00	5	149.400.000,00	5	173.400.000,00	5	183.300.000,00	5	219.300.000,00		
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1050	100		100		100		100		100			
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	1050	100		100		100		100		100			
	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	50	50		50		50		50		50			
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				28.680.000,00		29.880.000,00		34.680.000,00		36.660.000,00		43.860.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1050	100	28.680.000,00	100	29.880.000,00	100	34.680.000,00	100	36.660.000,00	100	43.860.000,00		
1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				35.850.000,00		37.350.000,00		43.350.000,00		45.825.000,00		54.825.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	1050	100	35.850.000,00	100	37.350.000,00	100	43.350.000,00	100	45.825.000,00	100	54.825.000,00		
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				43.020.000,00		44.820.000,00		52.020.000,00		54.990.000,00		65.790.000,00		
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1	1	43.020.000,00	1	44.820.000,00	1	52.020.000,00	1	54.990.000,00	1	65.790.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				21.510.000,00		22.410.000,00		26.010.000,00		27.495.000,00		32.895.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	50	50	21.510.000,00	50	22.410.000,00	50	26.010.000,00	50	27.495.000,00	50	32.895.000,00		
1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota				14.340.000,00		14.940.000,00		17.340.000,00		18.330.000,00		21.930.000,00		
Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	0	4	14.340.000,00	5	14.940.000,00	5	17.340.000,00	5	18.330.000,00	5	21.930.000,00		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				5.870.000.000,00		6.050.000.000,00		7.070.000.000,00		7.270.000.000,00		7.770.000.000,00		
Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR (Rencana Tata Ruang)	100	100	5.870.000.000,00	100	6.050.000.000,00	100	7.070.000.000,00	100	7.270.000.000,00	100	7.770.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				1.819.700.000,00		1.875.500.000,00		2.191.700.000,00		2.253.700.000,00		2.408.700.000,00		
Terselenggaranya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	3	3	1.819.700.000,00	3	1.875.500.000,00	3	2.191.700.000,00	3	2.253.700.000,00	3	2.408.700.000,00		
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2	2		2		2		2		2			
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	3	3		3		3		3		3			
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				36.394.000,00		37.510.000,00		43.834.000,00		45.074.000,00		48.174.000,00		
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	1	36.394.000,00	1	37.510.000,00	1	43.834.000,00	1	45.074.000,00	1	48.174.000,00		
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				163.773.000,00		168.795.000,00		197.253.000,00		202.833.000,00		216.783.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1	1	163.773.000,00	1	168.795.000,00	1	197.253.000,00	1	202.833.000,00	1	216.783.000,00		
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				272.955.000,00		281.325.000,00		328.755.000,00		338.055.000,00		361.305.000,00		
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2	2	272.955.000,00	2	281.325.000,00	2	328.755.000,00	2	338.055.000,00	2	361.305.000,00		
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				90.985.000,00		93.775.000,00		109.585.000,00		112.685.000,00		120.435.000,00		
Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	5	5	90.985.000,00	5	93.775.000,00	5	109.585.000,00	5	112.685.000,00	5	120.435.000,00		
1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota				109.182.000,00		112.530.000,00		131.502.000,00		135.222.000,00		144.522.000,00		
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	3	3	109.182.000,00	3	112.530.000,00	3	131.502.000,00	3	135.222.000,00	3	144.522.000,00		
1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota				236.561.000,00		243.815.000,00		284.921.000,00		292.981.000,00		313.131.000,00		
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	3	3	236.561.000,00	3	243.815.000,00	3	284.921.000,00	3	292.981.000,00	3	313.131.000,00		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				90.985.000,00		93.775.000,00		109.585.000,00		112.685.000,00		120.435.000,00		
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1	1	90.985.000,00	1	93.775.000,00	1	109.585.000,00	1	112.685.000,00	1	120.435.000,00		
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				72.788.000,00		75.020.000,00		87.668.000,00		90.148.000,00		96.348.000,00		
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1	1	72.788.000,00	1	75.020.000,00	1	87.668.000,00	1	90.148.000,00	1	96.348.000,00		
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				746.077.000,00		768.955.000,00		898.597.000,00		924.017.000,00		987.567.000,00		
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	5	5	746.077.000,00	5	768.955.000,00	5	898.597.000,00	5	924.017.000,00	5	987.567.000,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.467.500.000,00		1.512.500.000,00		1.767.500.000,00		1.817.500.000,00		1.942.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1	1	1.467.500.000,00	1	1.512.500.000,00	1	1.767.500.000,00	1	1.817.500.000,00	1	1.942.500.000,00		
	Jumlah data SHP Peta Dasar	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar				337.525.000,00		347.875.000,00		406.525.000,00		418.025.000,00		446.775.000,00		
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1	1	337.525.000,00	1	347.875.000,00	1	406.525.000,00	1	418.025.000,00	1	446.775.000,00		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				366.875.000,00		378.125.000,00		441.875.000,00		454.375.000,00		485.625.000,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1	1	366.875.000,00	1	378.125.000,00	1	441.875.000,00	1	454.375.000,00	1	485.625.000,00		
1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang				132.075.000,00		136.125.000,00		159.075.000,00		163.575.000,00		174.825.000,00		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10	10	132.075.000,00	10	136.125.000,00	10	159.075.000,00	10	163.575.000,00	10	174.825.000,00		
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				410.900.000,00		423.500.000,00		494.900.000,00		508.900.000,00		543.900.000,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1	1	410.900.000,00	1	423.500.000,00	1	494.900.000,00	1	508.900.000,00	1	543.900.000,00		
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				220.125.000,00		226.875.000,00		265.125.000,00		272.625.000,00		291.375.000,00		
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	5	5	220.125.000,00	5	226.875.000,00	5	265.125.000,00	5	272.625.000,00	5	291.375.000,00		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				821.800.000,00		847.000.000,00		989.800.000,00		1.017.800.000,00		1.087.800.000,00		
Terseleenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1	1	821.800.000,00	1	847.000.000,00	1	989.800.000,00	1	1.017.800.000,00	1	1.087.800.000,00		
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	1		1		1		1		1			
1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				164.360.000,00		169.400.000,00		197.960.000,00		203.560.000,00		217.560.000,00		
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1	1	164.360.000,00	1	169.400.000,00	1	197.960.000,00	1	203.560.000,00	1	217.560.000,00		
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				246.540.000,00		254.100.000,00		296.940.000,00		305.340.000,00		326.340.000,00		
Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	100	100	246.540.000,00	100	254.100.000,00	100	296.940.000,00	100	305.340.000,00	100	326.340.000,00		
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				246.540.000,00		254.100.000,00		296.940.000,00		305.340.000,00		326.340.000,00		
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	1	246.540.000,00	1	254.100.000,00	1	296.940.000,00	1	305.340.000,00	1	326.340.000,00		
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				164.360.000,00		169.400.000,00		197.960.000,00		203.560.000,00		217.560.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	1	164.360.000,00	1	169.400.000,00	1	197.960.000,00	1	203.560.000,00	1	217.560.000,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.761.000.000,00		1.815.000.000,00		2.121.000.000,00		2.181.000.000,00		2.331.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	0	1	1.761.000.000,00	1	1.815.000.000,00	1	2.121.000.000,00	1	2.181.000.000,00	1	2.331.000.000,00		
	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	0	10		10		10		10		10			
	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1	1		1		1		1		1			
	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	0	10		10		10		10		10			
1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				46.960.000,00		48.400.000,00		56.560.000,00		58.160.000,00		62.160.000,00		
Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	10	10	46.960.000,00	10	48.400.000,00	10	56.560.000,00	10	58.160.000,00	10	62.160.000,00		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				727.880.000,00		750.200.000,00		876.680.000,00		901.480.000,00		963.480.000,00		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1	727.880.000,00	1	750.200.000,00	1	876.680.000,00	1	901.480.000,00	1	963.480.000,00		
1.03.12.2.04.0005 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				58.700.000,00		60.500.000,00		70.700.000,00		72.700.000,00		77.700.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	0	10	58.700.000,00	10	60.500.000,00	10	70.700.000,00	10	72.700.000,00	10	77.700.000,00		
1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang				117.400.000,00		121.000.000,00		141.400.000,00		145.400.000,00		155.400.000,00		
Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	0	10	117.400.000,00	10	121.000.000,00	10	141.400.000,00	10	145.400.000,00	10	155.400.000,00		
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR				105.660.000,00		108.900.000,00		127.260.000,00		130.860.000,00		139.860.000,00		
Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	0	10	105.660.000,00	10	108.900.000,00	10	127.260.000,00	10	130.860.000,00	10	139.860.000,00		
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				70.440.000,00		72.600.000,00		84.840.000,00		87.240.000,00		93.240.000,00		
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1	1	70.440.000,00	1	72.600.000,00	1	84.840.000,00	1	87.240.000,00	1	93.240.000,00		
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				82.180.000,00		84.700.000,00		98.980.000,00		101.780.000,00		108.780.000,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1	1	82.180.000,00	1	84.700.000,00	1	98.980.000,00	1	101.780.000,00	1	108.780.000,00		
1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan				93.920.000,00		96.800.000,00		113.120.000,00		116.320.000,00		124.320.000,00		
Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1	1	93.920.000,00	1	96.800.000,00	1	113.120.000,00	1	116.320.000,00	1	124.320.000,00		
1.03.12.2.04.0011 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				117.400.000,00		121.000.000,00		141.400.000,00		145.400.000,00		155.400.000,00		
Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	0	1	117.400.000,00	1	121.000.000,00	1	141.400.000,00	1	145.400.000,00	1	155.400.000,00		
1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR				93.920.000,00		96.800.000,00		113.120.000,00		116.320.000,00		124.320.000,00		
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	0	1	93.920.000,00	1	96.800.000,00	1	113.120.000,00	1	116.320.000,00	1	124.320.000,00		
1.03.12.2.04.0013 - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang				105.660.000,00		108.900.000,00		127.260.000,00		130.860.000,00		139.860.000,00		
Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	0	1	105.660.000,00	1	108.900.000,00	1	127.260.000,00	1	130.860.000,00	1	139.860.000,00		
1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				140.880.000,00		145.200.000,00		169.680.000,00		174.480.000,00		186.480.000,00		
Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	0	1	140.880.000,00	1	145.200.000,00	1	169.680.000,00	1	174.480.000,00	1	186.480.000,00		

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
			1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
			1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
			1.03.02.2.01.0100 - Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
			1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
			1.03.02.2.01.0125 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
			1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
2.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
3.	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pembuangan sampah	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
4.	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			1.03.05.2.01.0020 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
			1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
			1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
			1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
			1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
5.	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0020 - Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0022 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
6.	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
			1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
7.	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	
8.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
			1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
			1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
			1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan	
			1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
			1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
			1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
9.	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			1.03.11.2.01.0009 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
			1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
			1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
			1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
			1.03.11.2.01.0013 - Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
			1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
			1.03.11.2.01.0015 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
			1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
			1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
			1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
			1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
			1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
			1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
			1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
			1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
			1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
			1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
			1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	
10.	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
			1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
			1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar	
			1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	
			1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
			1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
			1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
			1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
			1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
			1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
			1.03.12.2.04.0005 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	
			1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
			1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
			1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
			1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
			1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
			1.03.12.2.04.0011 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
			1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR	
			1.03.12.2.04.0013 - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
			1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
2.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR (Rencana Tata Ruang)	%	-	80	83	85	87	89	91	
3.	Persentase Sambungan Rumah yang terlayani akses airÂ minumÂ layak	%	75,2	76	76,5	77	77,5	78	78,5	
4.	Persentase Bangunan Gedung yang berfungsiÂ baik	%	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	
5.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor	72,15	90	91	91	92	92	93	
7.	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	66,16	70	75	80	85	90	95	
8.	Persentase kemantapan jalan kabupaten	%	57,05	67	68	69	70	72	73	
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase rumah tangga yang terlayani aksesÂ airÂ limbah	%	88,83	89	89,5	90	90,5	91	91,5	
11.	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi olehÂ Infrastruktur	%	62	64	66	68	70	72	74	
12.	Persentase Bangunan Lingkungan yang berfungsiÂ baik	%	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	
13.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	-	40	43	45	47	48	50	
14.	Persentase Daerah Irigasi dalam KondisiÂ Baik	%	49	50	51	52	53	54	55	
15.	Persentase Infrastruktur dasar air minum	%	75,2	76	77	78	79	80	81	
16.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,15	90	91	91	92	92	93	
17.	Persentase Infrastruktur dasar air limbah	%	88,83	94	94	95	95	96	96	
18.	Persentase sarana dan prasarana Bangunan Lingkungan yang berfungsi	%	43,08	44	45	46	47	48	49	
19.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Ha	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
20.	Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung yang berfungsi	%	71,97	72	73	74	75	76	77	